



# RENSTRA

## Tahun 2024-2026

**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jensen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini

berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 : 144 )
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 : 148 )

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Keuangan Daerah ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2024-2026.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

## **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah tahun 2024-2026.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Keuangan Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keuangan Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), menjelaskan bahwa Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas ,Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
  - b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;
  - d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;
  - f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;
  - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Keuangan Daerah membawahi:
- a. Sekretaris;
  - b. Bidang Anggaran;
  - c. Bidang Perbendaharaan;
  - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
  - f. Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
  - g. Bidang Aset;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam , Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Keuangan Daerah;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Keuangan Daerah;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Badan Keuangan Daerah;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Badan Keuangan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator meliputi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
  - c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

Badan Keuangan Daerah;

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Keuangan Daerah;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
  - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Keuangan Daerah;
  - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Inspektorat; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah.
- (1) Sub Koordinator Keuangan sebagaimana dipimpin oleh Sub Koordinator Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
  - (2) Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Badan Keuangan Daerah.
  - (3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:
    - a. pelaksanaan analisis keuangan Badan

Keuangan Daerah;

- b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Badan Keuangan Daerah;
  - c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan Keuangan Daerah; dan
  - d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Badan Keuangan Daerah.
- (1) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
  - (2) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
  - (3) Untuk melaksanakan, Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Keuangan Daerah;
    - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Keuangan Daerah; dan
    - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD dan LKPJ) Badan Keuangan Daerah.

## **BIDANG ANGGARAN**

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang anggaran kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana , Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Penganggaran;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran lingkup Perumusan Anggaran, Penyusunan Anggaran dan Sistem Informasi Anggaran;
  - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Penganggaran;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penganggaran; dan
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
  - a. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;
  - b. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
  - c. Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran.
- (1) Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kepala

Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pengkajian bahan kebijakan lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran;
  - b. menyiapkan bahan dan data analisis untuk perumusan kebijakan anggaran;
  - c. perumusan peraturan daerah lingkup perumusan kebijakan anggaran;
  - d. penetapan rancangan Peraturan Walikota perumusan kebijakan anggaran;
  - e. penyusunan standar biaya dan analisis standar belanja daerah;
  - f. perumusan dan penyusunan peraturan lainnya lingkup penganggaran; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perumusan Anggaran;
- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Kepala Seksi Penyusunan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penyusunan Anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penyusunan Anggaran;
  - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya;
  - c. penyusunan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan; penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD perubahan;
  - d. penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;

- e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan perubahannya; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan
  - g. lingkup Penyusunan Anggaran.
- (1) Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran dipimpin oleh Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
  - (2) Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sistem Informasi Anggaran.
  - (3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran mempunyai fungsi:
    - a. mendukung secara teknologi informasi terhadap teknis penganggaran sehingga data anggaran yang diolah dapat disajikan menjadi informasi APBD;
    - b. pemanfaatan system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
    - c. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung keuangan daerah untuk terintegrasi dengan system informasi keuangan daerah; dan
    - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sistem Informasi Anggaran.

### **Bidang Perbendaharaan**

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perbendaharaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Penatausahaan Pengeluaran, Penatausahaan Kas Daerah dan Pengendalian Belanja;
  - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perbendaharaan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perbendaharaan; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
- a. Seksi Penatausahaan Pengeluaran;
  - b. Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah; dan
  - c. Seksi Pengendalian Belanja.
- (1) Seksi Penatausahaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
- (2) Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penatausahaan Pengeluaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penatausahaan Pengeluaran;
  - b. penyusunan keputusan walikota tentang penunjukan Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran serta tugas-tugas yang dikuasakan;
  - c. penyusunan keputusan walikota tentang penunjukan Bendahara, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu Pengeluaran;
  - d. pengumpulan dan pengelolaan data gaji serta pengujian atas daftar gaji PNS;
  - e. penyusunan surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji SKPD yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat terkait;
  - f. penyusunan laporan dan penyetoran iuran wajib pegawai PFK atas pembayaran gaji;
  - g. pelaksanaan kerja sama untuk informasi penggajian, pelaporan dan pendataan PNS dengan instansi terkait;
  - h. pelaksanaan penerbitan SP2D dan daftar pengujian SP2D;
  - i. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D terbit dengan SKPD;
  - j. penyusunan register atas SPP, SPM dan SP2D belanja SKPD; dan
  - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Pengeluaran.
- (1) Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah dipimpin oleh Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
  - (2) Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi

dan pelaporan di lingkup Penatausahaan Kas Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penatausahaan Pengeluaran;
- b. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk;
- c. penyusunan Buku Kas Umum dan Mutasi Kas Daerah secara periodik;
- d. pelaksanaan verifikasi dan validasi atas bukti penerimaan serta pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;
- e. pelaksanaan penempatan uang daerah di rekening kas umum daerah;
- f. penempatan kelebihan kas dalam setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
- g. penyusunan keputusan walikota tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;
- h. rekonsiliasi nilai saldo kas di bank menurut rekening koran dengan saldo kas di bank menurut laporan posisi kas periodik;
- i. penyiapan dokumen pengajuan pencairan pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat;
- j. penyusunan dan pelaporan lembar konfirmasi dana transfer ke daerah kepada instansi terkait secara periodik; dan
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Pengeluaran.

(1) Seksi Pengendalian Belanja dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Belanja yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

- (2) Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengendalian Belanja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengendalian Belanja;
  - b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengeluaran APBD, DAU, DAK, dan sumber dana lainnya;
  - c. pengendalian atas pagu anggaran belanja SKPD berdasarkan DPA dan anggaran kas yang telah ditetapkan;
  - d. pengujian substantive dan formal terhadap SPP/SPM yang diajukan;
  - e. penyusunan Kartu Kendali Belanja berdasarkan DPA dan SPD SKPD;
  - f. penyusunan laporan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat;
  - g. penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Belanja.

### **Bidang Akuntansi Dan Pelaporan**

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Akuntansi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan

- kegiatan lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran dan Pelaporan Keuangan Daerah;
  - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuanagn Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
- a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
  - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran; dan
  - c. Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah.
- (1) Seksi Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Akuntansi Penerimaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Akuntansi Penerimaan;

- b. pencatatan/pembukuan ketetapan, target dan realisasi pendapatan daerah;
  - c. penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai penerimaan daerah;
  - d. pencatatan/pembukuan penerimaan benda berharga; dan
  - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Penerimaan.
- (1) Seksi Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - (2) Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Akuntansi Pengeluaran.
  - (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai fungsi:
    - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Akuntansi Pengeluaran.
    - b. penelitian dan pemeriksaan realisasi belanja daerah;
    - c. penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai belanja daerah;
    - d. penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akhir Kas; dan
    - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Pengeluaran.
- (1) Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - (2) Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan

evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelaporan Keuangan Daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pelaporan Keuangan Daerah;
  - b. pelaporan target dan realisasi APBD;
  - c. penyiapan bahan rapat, seminar, lokakarya di bidang pendapatan dan belanja daerah;
  - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triwulan, semester dan tahunan;
  - e. penyusunan Neraca Daerah; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pelaporan Keuangan Daerah.

## **Bidang Pendaftaran dan Penetapan**

### **Pajak Daerah**

- (1) Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang untuk kelancaran tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
  - c. penyusunan kebijakan petunjuk teknis, operasional dan petunjuk pelaksanaan sistem administrasi pendapatan daerah;
  - d. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
  - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang Langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi :
- a. Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
  - b. Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah; dan
  - c. Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
- (1) Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah ,dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah ;
  - b. melakukan penyusunan data dasar perkembangan subjek, objek dan pelayanan pajak daerah;
  - c. melaksanakan fasilitasi pengisian, penelitian dan perekaman data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan kelengkapannya;
  - d. melaksanakan fasilitasi proses penerbitan nomor identitas wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak (NOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Nomor Registrasi Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan sejenisnya;
  - e. menyiapkan bahan penerbitan keputusan pengukuhan wajib pajak daerah;
  - f. melakukan penerimaan dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya;
  - g. melakukan penerimaan dan penelitian data pajak daerah;
  - h. melaksanakan fasilitasi proses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

- i. melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan Daftar induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak (NOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Nomor Registrasi Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan sejenisnya;
  - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak Daerah;

- c. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data base subjek dan objek pajak daerah;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
  - e. menyiapkan bahan penatausahaan penerimaan pajak daerah;
  - f. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi Pajak Daerah;
  - g. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dengan melakukan peninjauan lapangan, penilaian terhadap harga tanah dan komponen bangunan;
  - h. melaksanakan validasi data dan sumber-sumber pendapatan pajak daerah;
  - i. melaksanakan verifikasi, perhitungan dan pembayaran/penyetoran pajak daerah;
  - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
  - (2) Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - b. melaksanakan penelitian data dan perhitungan ketetapan pajak daerah;
  - c. melaksanakan penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - d. melakukan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan membuat daftar himpunan wajib pajak daerah;
  - e. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
  - f. melakukan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - g. melaksanakan legalisasi benda berharga/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ karcis dan sejenisnya;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah**

- (1) Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah yang meliputi operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah, pemrosesan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang untuk kelancaran tugas Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
  - b. penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan system dan prosedur Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
  - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah;
  - d. pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah;
  - e. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan keberatan;
  - f. pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah;
  - g. pelaksanaan tindak lanjut surat

pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
  - j. pembahasan laporan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah maupun retribusi daerah;
  - k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisir permasalahan di lingkup bidang baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mencari alternatif pemecahannya;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah membawahi :
- a. Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah;
  - b. Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
  - c. Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah.

- (1) Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.
- (2) Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Penagihan dan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan proses Penagihan dan Pengelolaan Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
  - c. melaksanakan pemerosesan surat keberatan dari Wajib Pajak Daerah atas penetapan pajak daerah;
  - d. melakukan persiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan konfirmasi data pajak daerah;
  - f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.

- (2) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
  - b. melaksanakan intensifikasi pajak daerah pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
  - c. melaksanakan pemeriksaan, penelitian lapangan dan pertimbangan keberatan dalam proses pengurangan/keringanan Pajak Daerah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis Pemeriksaan dan pemrosesan permohonan keringanan dan atau Keberatan Pajak Daerah;
  - e. pemrosesan permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah;
  - f. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan serta banding pajak daerah;
  - g. melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di pemeriksaan dan keberatan Pajak Daerah;
  - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.
  - (2) Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
    - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Pengendalian Operasional dan penindakan Pajak Daerah;
    - b. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah;
    - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
    - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
    - e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
    - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Aset; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Aset lingkup Penatausahaan Aset, Penilaian dan Penghapusan Aset, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
  - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Aset;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Aset; dan
  - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Aset membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi :
  - a. Seksi Penatausahaan Aset;
  - b. Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset; dan
  - c. Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.
- (1) Seksi Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatausahaan Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penatausahaan Aset.

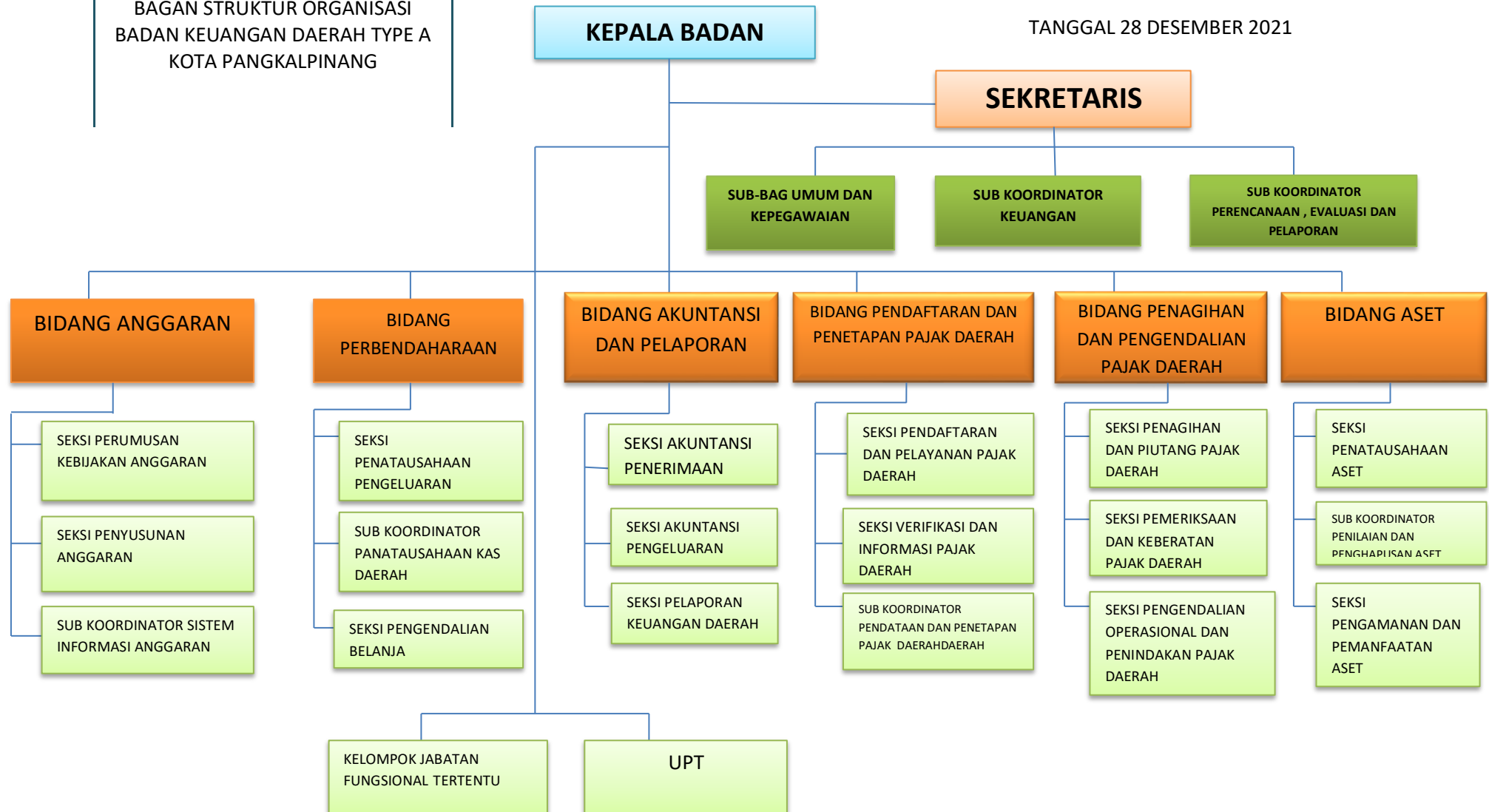
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penatausahaan Aset;
  - b. pendataan dan pencatatan/pembukuan aset/barang milik daerah ke dalam Buku Besar atau Daftar Barang Pemerintah Daerah;
  - c. penyusunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna Semesteran (DBPS/DBKPS);
  - d. Penghimpunan Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBPT/LBKPT);
  - e. Penyusunan Daftar Barang Pengelola dalam bentuk Laporan Barang Milik Daerah;
  - f. Inventarisasi aset/barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan penyusunan laporan hasil inventarisasi aset/barang milik daerah;
  - g. Pendataan mutasi aset dalam penyusunan nilai neraca aset tetap;
  - h. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi penatausahaan aset;
  - i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penatausahaan aset/barang milik daerah dalam neraca aset tetap;
  - j. Pelaksanaan kegiatan pendukung tertib administrasi penatausahaan aset; dan
  - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Aset.
- (1) Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi

dan pelaporan di lingkup Penilaian dan Penghapusan Aset.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penilaian dan Penghapusan Aset;
  - b. perumusan kebijakan teknis penilaian dan penghapusan aset;
  - c. penilaian aset/barang milik daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - d. pelaksanaan administrasi penghapusan aset/barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi pemusnahan aset/barang milik daerah;
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penilaian dan penghapusan aset/barang milik daerah dalam penyajian neraca aset tetap; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penilaian dan Penghapusan Aset.
- (1) Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
  - b. pengamanan aset/barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
  - c. perumusan kebijakan teknis terkait tertib

- administrasi pengamanan dan pemanfaatan aset;
- d. penghimpunan dokumen bukti kepemilikan aset barang milik daerah berupa sertifikat tanah/surat-surat tanah, BPKB kendaraan dinas bermotor/alat angkut bermotor dan dokumen bukti kepemilikan lainnya;
  - e. Verifikasi dan pelaksanaan pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa Sewa Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengamanan dan pemanfaatan aset/barang milik daerah dalam penyajian neraca aset tetap; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN DAERAH TYPE A  
KOTA PANGKALPINANG



## 2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah Tahun 2022, berjumlah 156 orang, terdiri dari 71 orang PNS, dan 85 orang PHL. Secara terinci dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan.

**Tabel. 2.2.1**  
**Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan tahun 2022**

| No.           | Jabatan       | Eselon | Jumlah     | Keterangan |
|---------------|---------------|--------|------------|------------|
| 1             | Kepala Badan  | II-b   | 1          |            |
| 2             | Sekretaris    | III-a  | 1          |            |
| 3             | Kepala Bidang | III-b  | 5          |            |
| 4             | Ka.Sub.Bag    | IV-a   | 3          |            |
| 5             | Kasi          | IV-a   | 15         |            |
| 6             | Staf          |        | 46         |            |
| 7             | PHL           | -      | 85         |            |
| <b>Jumlah</b> |               |        | <b>156</b> |            |

**Tabel. 2.2.2**  
**Pegawai Berdasarkan Pendidikan tahun 2022**

| No. | Pendidikan    | Jumlah    | Keterangan |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1.  | S2            | 5         |            |
| 2.  | S1            | 40        | PHL 37     |
| 3.  | D3            | 8         | PHL 1      |
| 4.  | SLTA          | 18        | PHL 47     |
| 5.  | SMP           | -         | -          |
|     | <b>JUMLAH</b> | <b>71</b> | <b>85</b>  |

**Tabel. 2.2.3**  
**Klasifikasi Pegawai berdasarkan golongan tahun 2022**

| Golongan      | A | B  | C  | D  | Jumlah    |
|---------------|---|----|----|----|-----------|
| I             | - | -  | -  | -  | -         |
| II            |   | 3  | 6  | 11 | 20        |
| III           | 6 | 12 | 16 | 11 | 45        |
| IV            | 6 |    |    |    | 6         |
| <b>Jumlah</b> |   |    |    |    | <b>71</b> |

### 2.3. Data Inventaris Badan Keuangan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

| No | Aset / Sarana dan Prasarana                  | Tahun | Ukuran | Satuan | Kondisi | Jumlah |
|----|----------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| 1  | Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi | 2015  | 7947   | M2     | Baik    | 1      |
| 2  | Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi | 2015  | 3300   | M2     | Baik    | 1      |
| 3  | Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi | 2015  | 1716   | M2     | Baik    | 1      |
| 4  | Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi | 2015  | 860    | M2     | Baik    | 1      |
| 5  | Tanah Bangunan Gudang                        | 1977  | 8274   | M2     | Baik    | 1      |
| 6  | Tanah Bangunan Gudang                        | 2015  | 3090   | M2     | Baik    | 1      |
| 7  | Tanah Bangunan Gudang                        | 2015  | 266    | M2     | Baik    | 1      |
| 8  | Tanah Bangunan Gudang                        | 2015  | 6542   | M2     | Baik    | 1      |
| 9  | Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel        | 2015  | 2875   | M2     | Baik    | 1      |
| 10 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah             | 1997  | 940    | M2     | Baik    | 1      |
| 11 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah             | 2015  | 1630   | M2     | Baik    | 1      |
| 12 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah             | 2020  | 2291   | M2     | Baik    | 1      |
| 13 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan        | 1997  | 3334   | M2     | Baik    | 1      |
| 14 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan        | 2015  | 4296   | M2     | Baik    | 1      |
| 15 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)    | 2015  | 64     | M2     | Baik    | 1      |
| 16 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2005  | 280640 | M2     | Baik    | 1      |
| 17 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2006  | 99100  | M2     | Baik    | 1      |
| 18 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2015  | 400000 | M2     | Baik    | 1      |
| 19 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2015  | 6473   | M2     | Baik    | 1      |
| 20 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2015  | 34410  | M2     | Baik    | 1      |
| 21 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2015  | 5852   | M2     | Baik    | 1      |
| 22 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 493    | M2     | Baik    | 1      |
| 23 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 430    | M2     | Baik    | 1      |
| 24 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 429    | M2     | Baik    | 1      |
| 25 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 300    | M2     | Baik    | 1      |
| 26 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 660    | M2     | Baik    | 1      |
| 27 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 60000  | M2     | Baik    | 1      |
| 28 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan        | 2020  | 240000 | M2     | Baik    | 1      |
| 29 | Tanah Kosong Yang Sudah                      | 2021  | 30000  | M2     | Baik    | 1      |

|    |                                            |      |          |    |      |   |
|----|--------------------------------------------|------|----------|----|------|---|
|    | Diperuntukkan                              |      |          |    |      |   |
| 30 | Tanah Hutan Lindung                        | 2015 | 5000     | M2 | Baik | 1 |
| 31 | pompa lainnya (dst)                        | 2020 |          |    | Baik | 1 |
| 32 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2002 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 33 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2002 | -standar |    | Baik | 1 |
| 34 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2004 |          |    | Baik | 1 |
| 35 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2005 |          |    | Baik | 1 |
| 36 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2006 | -standar |    | Baik | 1 |
| 37 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2012 | -standar |    | Baik | 1 |
| 38 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 39 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 40 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 41 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 42 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2014 | -standar |    | Baik | 1 |
| 43 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2015 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 44 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2015 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 45 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2022 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 46 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2022 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 47 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2022 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 48 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang<br>Kebawah ) | 2022 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 49 | Pick Up                                    | 2014 | -standar |    | Baik | 1 |
| 50 | Pick Up                                    | 2022 | -standar |    | Baik | 1 |
| 51 | Sepeda Motor                               | 2007 | -standar |    | Baik | 1 |
| 52 | Sepeda Motor                               | 2007 | -standar |    | Baik | 1 |
| 53 | Sepeda Motor                               | 2007 | -standar |    | Baik | 1 |
| 54 | Sepeda Motor                               | 2007 | -standar |    | Baik | 1 |
| 55 | Sepeda Motor                               | 2007 | -standar |    | Baik | 1 |
| 56 | Sepeda Motor                               | 2007 | -standar |    | Baik | 1 |
| 57 | Sepeda Motor                               | 2008 | -standar |    | Baik | 1 |
| 58 | Sepeda Motor                               | 2008 | -standar |    | Baik | 1 |
| 59 | Sepeda Motor                               | 2008 | -standar |    | Baik | 1 |
| 60 | Sepeda Motor                               | 2008 | -standar |    | Baik | 1 |
| 61 | Sepeda Motor                               | 2008 | -standar |    | Baik | 1 |
| 62 | Sepeda Motor                               | 2008 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 63 | Sepeda Motor                               | 2009 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 64 | Sepeda Motor                               | 2011 | -standar |    | Baik | 1 |
| 65 | Sepeda Motor                               | 2012 | -standar |    | Baik | 1 |
| 66 | Sepeda Motor                               | 2012 | -standar |    | Baik | 1 |
| 67 | Sepeda Motor                               | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 68 | Sepeda Motor                               | 2014 | standar  |    | Baik | 1 |

|     |                                 |      |           |  |      |    |
|-----|---------------------------------|------|-----------|--|------|----|
| 69  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 70  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 71  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 72  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 73  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 74  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 75  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 76  | Sepeda Motor                    | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 77  | Sepeda Motor                    | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 78  | Sepeda Motor                    | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 79  | Sepeda Motor                    | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 80  | Sepeda Motor                    | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 81  | Sepeda Motor                    | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 82  | Sepeda Motor                    | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 83  | Sepeda Motor                    | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 84  | Sepeda Motor                    | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 85  | Sepeda Motor                    | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 86  | Sepeda Motor                    | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 87  | Sepeda Motor                    | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 88  | Sepeda Motor                    | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 89  | Sepeda Motor                    | 2022 |           |  | Baik | 4  |
| 90  | Sepeda Motor                    | 2022 |           |  | Baik | 3  |
| 91  | Mesin Pompa air PMK             | 2014 | standar   |  | Baik | 1  |
| 92  | Mesin air Jet Pump              | 2021 | standar   |  | Baik | 1  |
| 93  | Mesin Air Tanam Club 3 PH       | 2021 | standar   |  | Baik | 1  |
| 94  | Mesin Kas Register              | 2012 | - standar |  | Baik | 1  |
| 95  | Mesin Penghitung Uang           | 2012 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 96  | Mesin Fotocopy Folio            | 2014 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 97  | Alat Reproduksi lainnya         | 2015 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 98  | Lemari Besi/Metal               | 2013 | -2 pintu  |  | Baik | 8  |
| 99  | Lemari Besi/Metal               | 2013 | -2 pintu  |  | Baik | 10 |
| 100 | Lemari Besi/Metal               | 2015 | 2 Pintu   |  | Baik | 1  |
| 101 | Lemari Besi/Metal               | 2016 | 2 pintu   |  | Baik | 3  |
| 102 | Lemari Besi/Metal               | 2017 |           |  | Baik | 9  |
| 103 | Lemari Kayu                     | 2014 | 2 Pintu   |  | Baik | 3  |
| 104 | Rak Besi                        | 2011 | 2 pintu   |  | Baik | 1  |
| 105 | Rak Besi                        | 2012 | 2 pintu   |  | Baik | 1  |
| 106 | Rak Besi                        | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 107 | Rak Besi                        | 2020 |           |  | Baik | 2  |
| 108 | Rak Besi                        | 2022 |           |  | Baik | 22 |
| 109 | Filing Cabinet Besi             | 2012 | -         |  | Baik | 1  |
| 110 | Brandkas                        | 2012 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 111 | Brandkas                        | 2017 |           |  | Baik | 1  |
| 112 | Brangkas                        | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 113 | Kardex Kayu                     | 2018 |           |  | Baik | 1  |
| 114 | Kardex Kayu                     | 2018 |           |  | Baik | 2  |
| 115 | Kardex Kayu                     | 2019 |           |  | Baik | 3  |
| 116 | Lemari Kaca                     | 2018 |           |  | Baik | 1  |
| 117 | Lemari Kaca                     | 2020 |           |  | Baik | 1  |
| 118 | Alat Penyimpanan Kantor lainnya | 2018 |           |  | Baik | 1  |

|     |                                     |      |             |  |      |    |
|-----|-------------------------------------|------|-------------|--|------|----|
| 119 | Papan Visual/Papan Nama             | 2018 |             |  | Baik | 1  |
| 120 | Papan Visual/Papan Nama             | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 121 | White Board                         | 2012 | -standar    |  | Baik | 1  |
| 122 | Alat Penghancur Kertas              | 2008 | Standar     |  | Baik | 5  |
| 123 | Alat Penghancur Kertas              | 2018 |             |  | Baik | 1  |
| 124 | Alat Penghancur Kertas              | 2022 |             |  | Baik | 3  |
| 125 | Perforator Besar                    | 2019 |             |  | Baik | 2  |
| 126 | LCD Projector/Infocus               | 2014 | -standar    |  | Baik | 1  |
| 127 | LCD Projector/Infocus               | 2015 | standar     |  | Baik | 1  |
| 128 | LCD Projector/Infocus               | 2019 |             |  | Baik | 1  |
| 129 | LCD Projector/Infocus               | 2022 | standar     |  | Baik | 1  |
| 130 | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 131 | Papan Nama Instansi                 | 2015 | 40 cm       |  | Baik | 1  |
| 132 | Papan Nama Instansi                 | 2015 | 40cm x 10cm |  | Baik | 2  |
| 133 | Papan Nama Instansi                 | 2015 | 40cm x 10cm |  | Baik | 13 |
| 134 | Papan Nama Instansi                 | 2015 | 40cm x 10cm |  | Baik | 1  |
| 135 | Papan Pengumuman                    | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 136 | Teralis                             | 2012 |             |  | Baik | 1  |
| 137 | Teralis                             | 2012 |             |  | Baik | 1  |
| 138 | Teralis                             | 2012 |             |  | Baik | 1  |
| 139 | Teralis                             | 2015 |             |  | Baik | 1  |
| 140 | Alat Kantor Lainnya                 | 2015 | standar     |  | Baik | 1  |
| 141 | Alat Kantor Lainnya                 | 2015 | standar     |  | Baik | 1  |
| 142 | Alat Kantor Lainnya                 | 2016 | standar     |  | Baik | 1  |
| 143 | Alat Kantor Lainnya                 | 2016 | 5 tingkat   |  | Baik | 14 |
| 144 | Alat Kantor Lainnya                 | 2018 |             |  | Baik | 1  |
| 145 | Alat Kantor Lainnya                 | 2018 |             |  | Baik | 2  |
| 146 | Alat Kantor Lainnya                 | 2019 |             |  | Baik | 2  |
| 147 | Alat Kantor Lainnya                 | 2019 |             |  | Baik | 1  |
| 148 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 2  |
| 149 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 2  |
| 150 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 2  |
| 151 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 3  |
| 152 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 153 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 154 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 155 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 156 | Alat Kantor Lainnya                 | 2020 |             |  | Baik | 1  |
| 157 | Alat Kantor Lainnya                 | 2022 |             |  | Baik | 15 |
| 158 | Alat Kantor Lainnya                 | 2022 |             |  | Baik | 1  |
| 159 | Alat Kantor Lainnya                 | 2022 |             |  | Baik | 4  |
| 160 | Alat Kantor Lainnya                 | 2022 |             |  | Baik | 1  |
| 161 | Alat Kantor Lainnya                 | 2022 |             |  | Baik | 1  |
| 162 | Alat Kantor Lainnya                 | 2022 |             |  | Baik | 2  |
| 163 | Meja Kerja/Besi                     | 2021 |             |  | Baik | 8  |
| 164 | Meja Kerja Kayu                     | 2012 | -1 biro     |  | Baik | 10 |
| 165 | Meja Kerja Kayu                     | 2012 | -1 biro     |  | Baik | 1  |
| 166 | Meja Kerja Kayu                     | 2013 | -1 biro     |  | Baik | 1  |

|     |                                     |      |          |  |      |    |
|-----|-------------------------------------|------|----------|--|------|----|
| 167 | Meja Kerja Kayu                     | 2017 |          |  | Baik | 8  |
| 168 | Meja Partisi                        | 2022 |          |  | Baik | 54 |
| 169 | Meja Pelayanan HPL                  | 2022 |          |  | Baik | 1  |
| 170 | Meja Rapat                          | 2012 | -standar |  | Baik | 1  |
| 171 | Meja Rapat                          | 2014 | -standar |  | Baik | 1  |
| 172 | Meja Rapat                          | 2018 |          |  | Baik | 10 |
| 173 | Meja Resepsionis                    | 2016 | standar  |  | Baik | 1  |
| 174 | Meja 1/2 Biro                       | 2011 | -standar |  | Baik | 2  |
| 175 | Meja 1/2 Biro                       | 2011 | -standar |  | Baik | 8  |
| 176 | Meja 1/2 Biro                       | 2013 | -standar |  | Baik | 10 |
| 177 | Meja 1/2 Biro                       | 2014 | -1 biro  |  | Baik | 30 |
| 178 | Meja 1/2 Biro                       | 2019 | 1/2 BIRO |  | Baik | 2  |
| 179 | Meja 1/2 Biro                       | 2019 |          |  | Baik | 20 |
| 180 | Meja 1/2 Biro                       | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 181 | Kasur/Spring Bed                    | 2018 |          |  | Baik | 1  |
| 182 | Kursi Rapat                         | 2018 |          |  | Baik | 10 |
| 183 | Kursi Biasa                         | 2019 |          |  | Baik | 21 |
| 184 | Kursi Biasa                         | 2021 |          |  | Baik | 20 |
| 185 | Bangku Tunggu                       | 2014 | -standar |  | Baik | 1  |
| 186 | Bangku Tunggu                       | 2016 | standar  |  | Baik | 2  |
| 187 | Bangku Tunggu                       | 2016 | standar  |  | Baik | 4  |
| 188 | Partisi                             | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 189 | Partisi                             | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 190 | Sofa                                | 2011 | -standar |  | Baik | 1  |
| 191 | Sofa                                | 2012 | -standar |  | Baik | 1  |
| 192 | Sofa                                | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 193 | Sofa                                | 2021 |          |  | Baik | 1  |
| 194 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 2016 | standar  |  | Baik | 1  |
| 195 | Mesin Pemotong Rumput               | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 196 | Lemari Es                           | 2016 | 2 pintu  |  | Baik | 1  |
| 197 | Lemari Es                           | 2016 | 2 pintu  |  | Baik | 1  |
| 198 | A.C. Window                         | 2017 |          |  | Baik | 6  |
| 199 | A.C. Window                         | 2019 |          |  | Baik | 4  |
| 200 | A.C. Standing                       | 2022 |          |  | Baik | 2  |
| 201 | A.C. Split                          | 2014 | - 1 pk   |  | Baik | 2  |
| 202 | A.C. Split                          | 2015 | 1 pk     |  | Baik | 6  |
| 203 | A.C. Split                          | 2015 | 1 pk     |  | Baik | 1  |
| 204 | A.C. Split                          | 2015 | 1 pk     |  | Baik | 1  |
| 205 | A.C. Split                          | 2016 | 1 pk     |  | Baik | 1  |
| 206 | A.C. Split                          | 2018 |          |  | Baik | 3  |
| 207 | A.C. Split                          | 2018 | 1 pk     |  | Baik | 1  |
| 208 | A.C. Split                          | 2020 |          |  | Baik | 3  |
| 209 | A.C. Split                          | 2020 |          |  | Baik | 3  |
| 210 | A.C. Split                          | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 211 | A.C. Split                          | 2021 | 1 PK     |  | Baik | 2  |
| 212 | A.C. Split                          | 2021 | 2 PK     |  | Baik | 3  |
| 213 | A.C. Split                          | 2022 |          |  | Baik | 4  |
| 214 | A.C. Split                          | 2022 |          |  | Baik | 3  |
| 215 | A.C. Split                          | 2022 |          |  | Baik | 2  |
| 216 | Kitchen Set                         | 2011 | Standar  |  | Baik | 1  |

|     |                                                 |      |           |  |      |    |
|-----|-------------------------------------------------|------|-----------|--|------|----|
| 217 | Alat Dapur lainnya                              | 2018 |           |  | Baik | 2  |
| 218 | Alat Dapur lainnya                              | 2019 |           |  | Baik | 3  |
| 219 | Televisi                                        | 2006 | 21 inc    |  | Baik | 1  |
| 220 | Televisi                                        | 2013 | -21 inc   |  | Baik | 1  |
| 221 | Televisi                                        | 2014 | -32 inc   |  | Baik | 1  |
| 222 | Televisi                                        | 2016 | 32 inc    |  | Baik | 2  |
| 223 | Televisi                                        | 2017 |           |  | Baik | 1  |
| 224 | Televisi                                        | 2019 |           |  | Baik | 1  |
| 225 | Televisi                                        | 2020 |           |  | Baik | 1  |
| 226 | Televisi                                        | 2021 |           |  | Baik | 1  |
| 227 | Televisi                                        | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 228 | Televisi                                        | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 229 | Televisi                                        | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 230 | Televisi                                        | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 231 | Sound System                                    | 2013 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 232 | Sound System                                    | 2022 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 233 | Sound Sirene dan ampli toa                      | 2022 | Standar   |  | Baik | 1  |
| 234 | Wireless                                        | 2012 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 235 | Wireless                                        | 2014 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 236 | Camera Video                                    | 2017 |           |  | Baik | 1  |
| 237 | Tiang Bendera                                   | 2015 | ++10meter |  | Baik | 1  |
| 238 | Tangga Aluminium                                | 2019 |           |  | Baik | 4  |
| 239 | Dispenser                                       | 2020 |           |  | Baik | 3  |
| 240 | Dispenser                                       | 2020 |           |  | Baik | 1  |
| 241 | Karpet                                          | 2018 |           |  | Baik | 1  |
| 242 | Karpet                                          | 2020 |           |  | Baik | 1  |
| 243 | Gordyn/Kray                                     | 2020 |           |  | Baik | 1  |
| 244 | Gordyn                                          | 2022 |           |  | Baik | 42 |
| 245 | Tangki Air                                      | 2021 |           |  | Baik | 1  |
| 246 | Alat Rumah Tangga Lain-lain                     | 2012 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 247 | Meja Kerja Pejabat Eselon II                    | 2013 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 248 | Meja Kerja Pejabat Eselon II                    | 2017 |           |  | Baik | 1  |
| 249 | Meja Kerja Pejabat                              | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 250 | Meja Kerja Pejabat                              | 2022 |           |  | Baik | 1  |
| 251 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural               | 2021 |           |  | Baik | 1  |
| 252 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2011 | -standar  |  | Baik | 10 |
| 253 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2011 | -standar  |  | Baik | 10 |
| 254 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2012 | -standar  |  | Baik | 14 |
| 255 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2012 | -standar  |  | Baik | 22 |
| 256 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2013 | -standar  |  | Baik | 10 |
| 257 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2013 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 258 | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota | 2014 | 1/2 Biro  |  | Baik | 10 |
| 259 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | 2013 | -standar  |  | Baik | 1  |
| 260 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | 2017 |           |  | Baik | 1  |
| 261 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | 2020 |           |  | Baik | 1  |
| 262 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural              | 2020 |           |  | Baik | 4  |

|     |                                      |      |         |  |      |    |
|-----|--------------------------------------|------|---------|--|------|----|
| 263 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural   | 2020 |         |  | Baik | 41 |
| 264 | Kursi Kerja Pejabat Lainnya          | 2021 |         |  | Baik | 1  |
| 265 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan       | 2020 |         |  | Baik | 2  |
| 266 | Microphone/Wireless MIC              | 2021 |         |  | Baik | 3  |
| 267 | Microphone/Wireless MIC              | 2022 |         |  | Baik | 1  |
| 268 | Microphone/Boom Stand                | 2021 |         |  | Baik | 2  |
| 269 | Microphone/Boom Stand                | 2021 |         |  | Baik | 2  |
| 270 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2011 | Standar |  | Baik | 1  |
| 271 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2012 | Standar |  | Baik | 1  |
| 272 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2013 | Standar |  | Baik | 10 |
| 273 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2013 | Standar |  | Baik | 1  |
| 274 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2013 | standar |  | Baik | 1  |
| 275 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2014 | Standar |  | Baik | 1  |
| 276 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 |         |  | Baik | 2  |
| 277 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 | standar |  | Baik | 3  |
| 278 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 | standar |  | Baik | 4  |
| 279 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 | standar |  | Baik | 7  |
| 280 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 281 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 282 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 283 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2017 |         |  | Baik | 9  |
| 284 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2018 |         |  | Baik | 3  |
| 285 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2018 |         |  | Baik | 6  |
| 286 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2019 |         |  | Baik | 2  |
| 287 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2019 |         |  | Baik | 2  |
| 288 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2019 |         |  | Baik | 3  |
| 289 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2019 |         |  | Baik | 5  |
| 290 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2022 |         |  | Baik | 10 |
| 291 | Uninterruptible Power Supply (UPS)   | 2022 |         |  | Baik | 1  |
| 292 | Scanner Coir, Presst                 | 2020 |         |  | Baik | 1  |
| 293 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 294 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 2  |
| 295 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 2  |
| 296 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 3  |
| 297 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 5  |
| 298 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 22 |
| 299 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 300 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 301 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 302 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 303 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 304 | Video Monitor                        | 2020 |         |  | Baik | 2  |
| 305 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2021 | standar |  | Baik | 1  |
| 306 | Layar Film/Projector                 | 2009 | standar |  | Baik | 1  |
| 307 | Layar Film/Projector                 | 2013 | standar |  | Baik | 1  |
| 308 | LCD Monitor                          | 2020 |         |  | Baik | 4  |
| 309 | Alat Studio Lainnya                  | 2015 | standar |  | Baik | 1  |
| 310 | Alat Studio Lainnya                  | 2021 |         |  | Baik | 1  |
| 311 | Alat Studio Lainnya                  | 2022 |         |  | Baik | 2  |
| 312 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 2021 | standar |  | Baik | 1  |

|     |                                              |      |          |  |             |    |
|-----|----------------------------------------------|------|----------|--|-------------|----|
| 313 | peralatan studio audio lainnya (dst)         | 2021 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 314 | Telephone (PABX)                             | 2012 | Standar  |  | Baik        | 1  |
| 315 | Telephone (PABX)                             | 2013 | Standar  |  | Baik        | 1  |
| 316 | Handy Talky (HT)                             | 2015 | standar  |  | Baik        | 13 |
| 317 | Handy Talky (HT)                             | 2015 |          |  | Baik        | 1  |
| 318 | Handy Talky (HT)                             | 2016 | standar  |  | Baik        | 10 |
| 319 | Facsimile                                    | 2013 | Standar  |  | Baik        | 1  |
| 320 | alat komunikasi telephone lainnya (dst)      | 2015 | standar  |  | Kurang Baik | 1  |
| 321 | alat komunikasi telephone lainnya (dst)      | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 322 | alat-alat sandi lainnya (dst)                | 2015 | standar  |  | Baik        | 8  |
| 323 | alat-alat sandi lainnya (dst)                | 2015 | standar  |  | Baik        | 16 |
| 324 | Unit Pemancar UHF Transportable              | 2016 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 325 | peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst) | 2015 | standar  |  | Baik        | 2  |
| 326 | peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst) | 2015 | standar  |  | Baik        | 5  |
| 327 | peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst) | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 328 | Genset                                       | 2019 |          |  | Baik        | 1  |
| 329 | Alat kedokteran lainnya                      | 2020 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 330 | Uninterrupted Power Supply (UPS)             | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 331 | Portable power station                       | 2022 | standar  |  | Baik        | 3  |
| 332 | Local Area Network (LAN)                     | 2012 | -standar |  | Baik        | 1  |
| 333 | Komputer Jaringan lainnya                    | 2012 | -standar |  | Baik        | 1  |
| 334 | Komputer Jaringan lainnya                    | 2015 | standar  |  | Baik        | 4  |
| 335 | Komputer Jaringan lainnya                    | 2015 | standar  |  | Baik        | 5  |
| 336 | Komputer Jaringan lainnya                    | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 337 | Komputer Jaringan lainnya                    | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 338 | Komputer Jaringan lainnya                    | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 339 | P.C Unit                                     | 2011 | -standar |  | Baik        | 10 |
| 340 | P.C Unit                                     | 2012 | -standar |  | Baik        | 6  |
| 341 | P.C Unit                                     | 2013 | -standar |  | Baik        | 5  |
| 342 | P.C Unit                                     | 2014 | -standar |  | Baik        | 6  |
| 343 | P.C Unit                                     | 2015 |          |  | Baik        | 5  |
| 344 | P.C Unit                                     | 2015 |          |  | Baik        | 10 |
| 345 | P.C Unit                                     | 2015 | standar  |  | Baik        | 15 |
| 346 | P.C Unit                                     | 2015 | standar  |  | Baik        | 1  |
| 347 | P.C Unit                                     | 2017 |          |  | Baik        | 10 |
| 348 | P.C Unit                                     | 2017 |          |  | Baik        | 1  |
| 349 | P.C Unit                                     | 2017 |          |  | Baik        | 1  |
| 350 | P.C Unit                                     | 2018 |          |  | Baik        | 4  |
| 351 | P.C Unit                                     | 2018 |          |  | Baik        | 6  |
| 352 | P.C Unit                                     | 2018 |          |  | Baik        | 1  |
| 353 | P.C Unit                                     | 2019 |          |  | Baik        | 5  |
| 354 | P.C Unit                                     | 2019 |          |  | Baik        | 13 |
| 355 | P.C Unit                                     | 2020 |          |  | Baik        | 2  |
| 356 | P.C Unit                                     | 2020 |          |  | Baik        | 6  |
| 357 | P.C Unit                                     | 2020 |          |  | Baik        | 6  |
| 358 | P.C Unit                                     | 2021 |          |  | Baik        | 2  |
| 359 | P.C Unit                                     | 2021 |          |  | Baik        | 3  |

|     |                                   |      |         |   |      |    |
|-----|-----------------------------------|------|---------|---|------|----|
| 360 | P.C Unit                          | 2021 |         |   | Baik | 5  |
| 361 | P.C Unit                          | 2021 |         |   | Baik | 5  |
| 362 | P.C Unit                          | 2021 |         |   | Baik | 10 |
| 363 | P.C Unit                          | 2021 |         |   | Baik | 1  |
| 364 | P.C Unit                          | 2022 |         |   | Baik | 1  |
| 365 | P.C Unit                          | 2022 |         |   | Baik | 10 |
| 366 | P.C Unit                          | 2022 |         |   | Baik | 1  |
| 367 | P.C Unit                          | 2022 |         |   | Baik | 3  |
| 368 | P.C Unit                          | 2022 |         |   | Baik | 1  |
| 369 | Lap Top                           | 2011 | -14 inc |   | Baik | 3  |
| 370 | Lap Top                           | 2015 | standar |   | Baik | 3  |
| 371 | Lap Top                           | 2017 |         |   | Baik | 1  |
| 372 | Lap Top                           | 2018 |         |   | Baik | 1  |
| 373 | Lap Top                           | 2019 |         |   | Baik | 3  |
| 374 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 2  |
| 375 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 2  |
| 376 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 4  |
| 377 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 4  |
| 378 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 4  |
| 379 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 1  |
| 380 | Lap Top                           | 2020 |         |   | Baik | 1  |
| 381 | Lap Top                           | 2021 |         |   | Baik | 1  |
| 382 | Lap Top                           | 2022 |         |   | Baik | 4  |
| 383 | Lap Top                           | 2022 |         |   | Baik | 3  |
| 384 | Lap Top                           | 2022 |         |   | Baik | 1  |
| 385 | Lap Top                           | 2022 |         |   | Baik | 1  |
| 386 | Lap Top                           | 2022 |         |   | Baik | 1  |
| 387 | Lap Top                           | 2022 |         |   | Baik | 2  |
| 388 | Note Book                         | 2013 | -14 inc |   | Baik | 1  |
| 389 | Note Book                         | 2013 |         |   | Baik | 1  |
| 390 | Note Book                         | 2014 | -14 inc |   | Baik | 1  |
| 391 | Note Book                         | 2014 | -14 inc |   | Baik | 1  |
| 392 | Note Book                         | 2014 | -14 inc |   | Baik | 1  |
| 393 | Tablet PC                         | 2021 |         |   | Baik | 1  |
| 394 | Tablet PC                         | 2021 |         |   | Baik | 1  |
| 395 | Tablet PC                         | 2022 | -       | - | Baik | 2  |
| 396 | Tablet PC                         | 2022 | -       | - | Baik | 5  |
| 397 | Tablet PC                         | 2022 | -       | - | Baik | 1  |
| 398 | Tablet PC                         | 2022 | -       | - | Baik | 3  |
| 399 | Tablet PC                         | 2022 | -       | - | Baik | 1  |
| 400 | Personal Komputer lainnya         | 2018 |         |   | Baik | 1  |
| 401 | Personal Komputer lainnya         | 2020 |         |   | Baik | 8  |
| 402 | Komputer Unit Lainnya             | 2015 | standar |   | Baik | 1  |
| 403 | Komputer Unit Lainnya             | 2015 | standar |   | Baik | 1  |
| 404 | Hard Disk                         | 2015 | standar |   | Baik | 1  |
| 405 | Hard Disk                         | 2015 |         |   | Baik | 3  |
| 406 | Hard Disk                         | 2022 |         |   | Baik | 7  |
| 407 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2020 |         |   | Baik | 3  |
| 408 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2020 |         |   | Baik | 3  |
| 409 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 2022 |         |   | Baik | 5  |

|     |                                       |      |          |  |      |    |
|-----|---------------------------------------|------|----------|--|------|----|
| 410 | Scanner (Peralatan Mini Komputer)     | 2022 |          |  | Baik | 7  |
| 411 | Monitor                               | 2019 |          |  | Baik | 3  |
| 412 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2012 | -standar |  | Baik | 12 |
| 413 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2013 | Standar  |  | Baik | 10 |
| 414 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2013 | Standar  |  | Baik | 10 |
| 415 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2013 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 416 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2013 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 417 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2014 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 418 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2014 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 419 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2014 | standar  |  | Baik | 1  |
| 420 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 | standar  |  | Baik | 2  |
| 421 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 | standar  |  | Baik | 2  |
| 422 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 | standar  |  | Baik | 2  |
| 423 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 |          |  | Baik | 3  |
| 424 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 | standar  |  | Baik | 4  |
| 425 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 426 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 427 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2017 |          |  | Baik | 7  |
| 428 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2018 |          |  | Baik | 3  |
| 429 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2018 |          |  | Baik | 6  |
| 430 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2019 |          |  | Baik | 3  |
| 431 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2019 |          |  | Baik | 13 |
| 432 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2020 |          |  | Baik | 3  |
| 433 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2020 |          |  | Baik | 4  |
| 434 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 435 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 |          |  | Baik | 8  |
| 436 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 |          |  | Baik | 1  |
| 437 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 |          |  | Baik | 3  |
| 438 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 |          |  | Baik | 3  |
| 439 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 |          |  | Baik | 10 |
| 440 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 |          |  | Baik | 2  |
| 441 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2022 |          |  | Baik | 8  |

|     |                                       |      |          |  |      |    |
|-----|---------------------------------------|------|----------|--|------|----|
| 442 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2022 |          |  | Baik | 10 |
| 443 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2022 |          |  | Baik | 6  |
| 444 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2019 |          |  | Baik | 1  |
| 445 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2019 |          |  | Baik | 1  |
| 446 | External/ Portable Hardisk            | 2020 |          |  | Baik | 1  |
| 447 | Peralatan Personal Komputer lainnya   | 2015 | standar  |  | Baik | 2  |
| 448 | Peralatan Personal Komputer lainnya   | 2015 | standar  |  | Baik | 6  |
| 449 | Server                                | 2011 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 450 | Server                                | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 451 | Server                                | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 452 | Server                                | 2022 | standar  |  | Baik | 2  |
| 453 | Server                                | 2022 | standar  |  | Baik | 1  |
| 454 | Server                                | 2022 | standar  |  | Baik | 1  |
| 455 | Router                                | 2011 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 456 | Router                                | 2012 | Standar  |  | Baik | 1  |
| 457 | Router                                | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 458 | Router                                | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 459 | Router                                | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 460 | Kabel UTP                             | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 461 | Kabel UTP                             | 2015 | standar  |  | Baik | 3  |
| 462 | Kabel UTP                             | 2015 | standar  |  | Baik | 19 |
| 463 | Kabel UTP                             | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 464 | Kabel UTP                             | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 465 | Kabel UTP                             | 2015 | standar  |  | Baik | 1  |
| 466 | Switch 8 port                         | 2021 |          |  | Baik | 15 |
| 467 | Switch 16 port                        | 2021 |          |  | Baik | 2  |
| 468 | Switch 8 port Gigabit                 | 2021 |          |  | Baik | 2  |
| 469 | Switch 16 port Gigabit                | 2021 |          |  | Baik | 1  |
| 470 | Switch 24 port Gigabit                | 2021 |          |  | Baik | 1  |
| 471 | Switch Gigabit 16 Port                | 2022 |          |  | Baik | 1  |
| 472 | Router indoor 13 port                 | 2021 |          |  | Baik | 1  |
| 473 | Router indoor 5 port                  | 2021 |          |  | Baik | 3  |
| 474 | Routerboard 3011UiAS-RM               | 2022 |          |  | Baik | 1  |
| 475 | Load balancing router                 | 2021 |          |  | Baik | 1  |
| 476 | Wireless Access Point                 | 2011 | -standar |  | Baik | 1  |
| 477 | Wireless Access Point                 | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 478 | Wireless Access Point                 | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 479 | Wireless Access Point                 | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 480 | Wireless Access Point                 | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 481 | Wireless Access Point                 | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 482 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2011 | -standar |  | Baik | 1  |
| 483 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 484 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 485 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 486 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 487 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |
| 488 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | -standar |  | Baik | 1  |
| 489 | Peralatan Jaringan lainnya            | 2013 | standar  |  | Baik | 1  |

|     |                                   |      |          |    |      |   |
|-----|-----------------------------------|------|----------|----|------|---|
| 490 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2013 | standar  |    | Baik | 1 |
| 491 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 2 |
| 492 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 2 |
| 493 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 4 |
| 494 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 4 |
| 495 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 1 |
| 496 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 1 |
| 497 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 1 |
| 498 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 1 |
| 499 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2015 | standar  |    | Baik | 1 |
| 500 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2022 |          |    | Baik | 3 |
| 501 | Peralatan Jaringan lainnya        | 2022 |          |    | Baik | 1 |
| 502 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | -2 pintu |    | Baik | 1 |
| 503 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | -standar |    | Baik | 1 |
| 504 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | -standar |    | Baik | 1 |
| 505 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | -standar |    | Baik | 1 |
| 506 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | -standar |    | Baik | 1 |
| 507 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 508 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 509 | Peralatan Komputer lainnya        | 2011 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 510 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | -standar |    | Baik | 1 |
| 511 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | standar  |    | Baik | 1 |
| 512 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | standar  |    | Baik | 1 |
| 513 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | standar  |    | Baik | 1 |
| 514 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | standar  |    | Baik | 1 |
| 515 | Peralatan Komputer lainnya        | 2022 | standar  |    | Baik | 2 |
| 516 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | -2 pintu |    | Baik | 1 |
| 517 | Peralatan Komputer lainnya        | 2012 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 518 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | standar  |    | Baik | 1 |
| 519 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | standar  |    | Baik | 1 |
| 520 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 521 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 522 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 523 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | -standar |    | Baik | 1 |
| 524 | Peralatan Komputer lainnya        | 2013 | standar  |    | Baik | 1 |
| 525 | Peralatan Komputer lainnya        | 2022 | standar  |    | Baik | 3 |
| 526 | Peralatan Komputer lainnya        | 2022 | standar  |    | Baik | 1 |
| 527 | Closed Circuit Television (CCTV)  | 2014 | Standar  |    | Baik | 1 |
| 528 | Bangunan Gedung Kantor Permanen   | 2010 |          | M2 | Baik | 1 |
| 529 | Bangunan Gedung Kantor Permanen   | 2012 | 0        | M2 | Baik | 1 |
| 530 | Bangunan Gedung Kantor Permanen   | 2015 |          | M2 | Baik | 1 |
| 531 | Bangunan Gedung Kantor Permanen   | 2015 |          | M2 | Baik | 1 |
| 532 | Rumah Panel                       | 2015 |          | M2 | Baik | 1 |
| 533 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain  | 2002 | 0        | M2 | Baik | 1 |
| 534 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain  | 2013 | 0        | M2 | Baik | 1 |
| 535 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain  | 2014 | 0        | M2 | Baik | 1 |
| 536 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain  | 2022 | 0        | M2 | Baik | 1 |
| 537 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain  | 2016 |          | M2 | Baik | 1 |
| 538 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain  | 2017 |          | M2 | Baik | 1 |
| 539 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 2015 |          | M2 | Baik | 1 |

|     |                                               |      |      |    |      |   |
|-----|-----------------------------------------------|------|------|----|------|---|
| 540 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen             | 2020 |      | M2 | Baik | 1 |
| 541 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen            | 2008 |      | M2 | Baik | 1 |
| 542 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen            | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 543 | Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 544 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2002 | 0    | M2 | Baik | 1 |
| 545 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 546 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2015 | 64   | M2 | Baik | 1 |
| 547 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2015 | 64   | M2 | Baik | 1 |
| 548 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2015 | 64   | M2 | Baik | 1 |
| 549 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2015 | 64   | M2 | Baik | 1 |
| 550 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen      | 2015 | 31.5 | M2 | Baik | 1 |
| 551 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2014 | 0    | M2 | Baik | 1 |
| 552 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 553 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 554 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 555 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 556 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 557 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 558 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 559 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 560 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 561 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 562 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 563 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 564 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 565 | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)     | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 566 | Gedung Pos Jaga Permanen                      | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 567 | Gedung Pos Jaga Permanen                      | 2015 |      | M2 | Baik | 1 |
| 568 | Gedung Garasi/Pool Permanen                   | 2002 | 0    | M2 | Baik | 1 |
| 569 | Gedung Garasi/Pool Permanen                   | 2012 | 0    | M2 | Baik | 1 |
| 570 | Gedung Garasi/Pool Permanen                   | 2014 | 0    | M2 | Baik | 1 |
| 571 | Gedung Garasi/Pool Permanen                   | 2019 |      | M2 | Baik | 1 |
| 572 | Gedung Garasi/Pool Permanen                   | 2022 |      | M2 | Baik | 1 |
| 573 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 2002 | 0    | M2 | Baik | 1 |

|     |                                                    |      |      |    |             |   |
|-----|----------------------------------------------------|------|------|----|-------------|---|
| 574 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)              | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 575 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)              | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 576 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)              | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 577 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)              | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 578 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)              | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 579 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)              | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 580 | Bangunan Tempat Parkir                             | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 581 | Bangunan Tempat Parkir                             | 2019 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 582 | Bangunan Tempat Parkir                             | 2019 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 583 | Bangunan Tempat Parkir                             | 2020 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 584 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2009 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 585 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2014 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 586 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2014 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 587 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2014 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 588 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 589 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 590 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2015 |      | M2 | Baik        | 2 |
| 591 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya                    | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 592 | Taman Permanen                                     | 2019 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 593 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya               | 2008 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 594 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya               | 2013 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 595 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya               | 2014 | 3334 | M2 | Baik        | 1 |
| 596 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya               | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 597 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya               | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 598 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya               | 2022 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 599 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 600 | Hotel Permanen                                     | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 601 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya                    | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 602 | Jalan Kabupaten Kolektor                           | 2010 |      | M2 | Kurang Baik | 1 |
| 603 | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)  | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 604 | Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain          | 2015 |      | M2 | Kurang Baik | 1 |
| 605 | Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain          | 2014 | 0    | M2 | Baik        | 1 |
| 606 | Jaringan listrik lainnya                           | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 607 | Jaringan listrik lainnya                           | 2015 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 608 | Jaringan telepon lainnya                           | 2017 |      | M2 | Baik        | 1 |
| 609 | Buku Umum Lain-lain                                | 2009 |      |    | Baik        | 1 |
| 610 | Buku Umum Lain-lain                                | 2009 |      |    | Baik        | 1 |
| 611 | Buku Umum Lain-lain                                | 2009 |      |    | Baik        | 1 |
| 612 | Buku Umum Lain-lain                                | 2009 |      |    | Baik        | 1 |
| 613 | Buku Umum Lain-lain                                | 2009 |      |    | Baik        | 1 |

|     |                     |      |  |  |      |    |
|-----|---------------------|------|--|--|------|----|
| 614 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 615 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 616 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 617 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 618 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 619 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 620 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 621 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 622 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 623 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 624 | Buku Umum Lain-lain | 2009 |  |  | Baik | 1  |
| 625 | Buku Umum Lain-lain | 2015 |  |  | Baik | 11 |
| 626 | Peta Lokasi         | 2015 |  |  | Baik | 3  |
| 627 | Peta Lokasi         | 2015 |  |  | Baik | 3  |
| 628 | Peta Lokasi         | 2015 |  |  | Baik | 84 |

## 2.4. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

### 2.4.1 Kinerja Pelayanan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

| No. | Indikator Kinerja                                 | Target 2019 | Realisasi 2019 | Kinerja 2019 | Target 2020 | Realisasi 2020 | Kinerja 2020 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|     |                                                   | %           | %              | %            | %           | %              | %            |
| 1   | Rasio Realisasi Belanja terhadap belanja anggaran | 86          | 89,12          | 103,63       | 86,50       | 90,84          | 105,02       |

| No. | Indikator Kinerja                                         | Target 2021 | Realisasi 2021 | Kinerja 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Kinerja 2022 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|     |                                                           | %           | %              | %            | %           | %              | %            |
| 1   | Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu | 100         | 100            | 100          | 100         | 100            | 100          |

Kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2019, 2020 yaitu dengan indikator Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah yaitu pada tahun 2019 sebesar 87,5 % dan pada tahun 2020 sebesar 86 %. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 dengan indikator sasaran Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dengan capaian realiasi 100 % .

#### 2.4.2 Kinerja Pelayanan Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 20 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perongan Dinas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator ketersediaan daftar aset/ Inventaris, semua tercapai 100 persen ini diperkuat dengan adanya SIMDA BMD yang cukup membantu para pengurus barang OPD untuk entry data

aset. Dengan baiknya pengelolaan barang milik daerah maka cukup membantu mencapai nilai WTP dalam Laporan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang. Saat ini dalam rekapan Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang ada berupa 3.022 unit Gedung, ada 1,325 unit kendaraan dan Tanah seluas 9.382.511, 155 M2.

Adapun rekapan nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

| <b>ASET TETAP</b>           | <b>Tahun 2019</b>           | <b>Tahun 2020</b>           | <b>Tahun 2021</b>           | <b>Tahun 2022</b>           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tanah                       | 1.048.301.132.624,60        | 1.006.700.102.988,60        | 1.072.711.153.335,60        | 1.098.124.299.067,44        |
| Peralatan dan Mesin         | 409.505.769.900,86          | 342.982.827.172,09          | 453.999.713.816,95          | 517.907.998.174,16          |
| Gedung dan Bangunan         | 823.759.447.637,88          | 787.691.402.823,26          | 862.150.058.977,68          | 945.455.977.438,36          |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.384.336.341.947,64        | 1.285.051.734.355,51        | 1.503.777.681.664,93        | 1.637.849.599.617,44        |
| Aset Tetap Lainnya          | 14.776.843.778,41           | 12.466.744.843,63           | 14.593.717.071,41           | 15.050.436.459,41           |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 109.669.573.315,66          | 110.703.673.203,76          | 138.463.958.592,23          | 105.970.548.384,55          |
| Akumulasi Penyusutan        | 1.030.218.300.835,96)       | (866.748.554.984,96)        | (1.187.935.582.847,16)      | -1.350.318.805.030,06       |
|                             | <b>2.760.130.808.369,09</b> | <b>2.678.847.930.401,89</b> | <b>2.857.760.700.611,64</b> | <b>2.970.040.054.111,30</b> |

#### **2.4.3 Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah**

Struktur Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan ini sebenarnya di luar kendali Pemda Kota Pangkalpinang karena pengelolaannya tergantung dari Pemerintah Pusat
- Lain-lain Pendapatan yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lain,

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Atas Pemerintah Lainnya. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Meningkatnya PAD Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari meningkatnya optimalitas pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Kota Pangkalpinang. Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022, PAD Kota Pangkalpinang bertambah Rp. 27.479.689.092,42 yaitu dari Rp. 155.116.318.111,20 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 182.596.007.203,62 pada Tahun 2022. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **2.4.3.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas perencanaan dan pembangunan di daerah didukung dengan dan pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 4 ( empat ) tahun terakhir mengalami kenaikan.

Tabel 2.4.3.1  
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2022

| TAHUN | PENDAPATAN ASLI DAERAH |                    |        | Pertumbuhan (%) |
|-------|------------------------|--------------------|--------|-----------------|
|       | TARGET                 | REALISASI          | %      |                 |
| 2019  | 150.170.133.726,00     | 155.116.318.111,20 | 103,29 | -7,19           |
| 2020  | 134.560.289.279,18     | 140.964.396.672,73 | 104,76 | -9,12           |
| 2021  | 143.391.826.819,00     | 168.864.062.465,32 | 117,76 | 19,79           |
| 2022  | 187.560.407.345,48     | 201.971.524.717,60 | 107,68 | 8,13            |

Kontibusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang dari tahun 2019 - 2022 relatif masih kecil bahkan menurun dengan demikian tingkat kemandirian masih terus di upayakan, mengingat “Gap” antara PAD dengan APBD masih jauh dapat di lihat tabel di bawah ini kontribusi PAD terhadap APBD.

Tabel.2.4.3.1a  
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Pangkalpinang

| Tahun | PAD                | Pertumbuhan        |        | APBD               | Proporsi |
|-------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|----------|
|       |                    | Rp                 | %      |                    |          |
| 2019  | 155.116.318.111,20 | -12.015.673.554,78 | -7,75  | 89.169.433.192.400 | 0,17     |
| 2020  | 140.967.139.104,73 | -14.149.179.006.47 | -10,04 | 838.099.024.099,18 | 16,82    |
| 2021  | 168.864.062.465,31 | 27.896.923.360,58  | 0,165  | 948.312.093.447,38 | 17,81    |
| 2022  | 182.596.007.203,62 | 13.731.944.738,31  | 0,075  | 936.745.765.157,62 | 19,49    |

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2019 - 2022 mengalami kenaikan

**Tabel.2.4.3.1b**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022**

| NAMA PAJAK                                               | TAHUN 2019         |                    |        | TAHUN 2020         |                    |        | TAHUN 2021         |                    |        | TAHUN 2022         |                    |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
|                                                          | TARGET             | REALISASI          | %      | TARGET             | REALISASI          | %      | TARGET             | REALISASI          | %      | TARGET             | REALISASI          | %      |
| <b>PAJAK DAERAH</b>                                      | 87.562.023.876,00  | 90.644.297.458,15  | 103,52 | 74.073.000.000,00  | 78.015.230.917,20  | 105,32 | 87.160.000.000,00  | 93.456.851.905,00  | 107,22 | 110.000.000.000,00 | 117.328.042.462,00 | 106,66 |
| <b>RETRIBUSI DAERAH</b>                                  | 14.334.725.200,00  | 11.987.637.092,32  | 83,63  | 14.908.274.163,13  | 12.754.645.808,29  | 85,55  | 11.383.200.000,00  | 11.919.957.986,42  | 104,72 | 13.810.678.605,00  | 12.073.462.782,74  | 87,42  |
| <b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b> | 5.932.826.426,00   | 5.932.828.425,98   | 100,00 | 6.000.000.000,00   | 5.337.807.846,73   | 88,96  | 6.018.000.000,00   | 6.032.648.895,15   | 100,24 | 6.363.358.117,00   | 6.707.028.141,02   | 105,40 |
| <b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>                            | 42.340.558.224,00  | 46.551.555.134,75  | 109,95 | 39.579.015.116,05  | 44.856.712.100,51  | 113,33 | 38.830.626.819,00  | 57.454.603.678,75  | 147,96 | 57.386.370.623,48  | 65.862.991.331,84  | 114,77 |
| <b>PAD</b>                                               | 150.170.133.726,00 | 155.116.318.111,20 | 103,29 | 134.560.289.279,18 | 140.964.396.672,73 | 104,76 | 143.391.826.819,00 | 168.864.062.465,32 | 117,76 | 187.560.407.345,48 | 201.971.524.717,60 | 107,68 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2019-2022 di dominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah pada peningkatan baik secara absolut maupun secara proporsi.

## 1. Pajak Daerah

Berdasarkan ketentuan Pajak Daerah yang dikelola  
Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak BPHTB

k. Pajak PBB

Perkembangan Penerimaan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.2.4.3.1c  
Perkembangan Pajak Daerah

| TAHUN | PAJAK DAERAH       |                    |         | Pertumbuhan (%) |
|-------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|
|       | TARGET             | REALISASI          | %       |                 |
| 2019  | 87.562.023.876,00  | 90.644.297.458,15  | 103,520 | 5,40016         |
| 2020  | 74.073.000.000,00  | 78.015.230.917,20  | 105,322 | -16,18795       |
| 2021  | 87.160.000.000,00  | 93.456.851.905,00  | 107,224 | 19,79           |
| 2022  | 110.000.000.000,00 | 117.328.042.462,00 | 106,662 | 20,65           |

Dari tabel di atas terlihat bahwa Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2019 - 2022 mengalami kenaikan,bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah walaupun demikian Petumbuhan Pajak Daerah trend kontribusinya mengarah pada peningkatan baik secara absolut maupun secara proporsi.

Tabel.2.4.3.1d  
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

| Tahun | Jenis Pendapatan Daerah |                    | Proporsi (%) |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------|
|       | PAD (Rp)                | Pajak Daerah       |              |
| 2019  | 155.116.318.111,20      | 90.644.297.458,15  | 58,44        |
| 2020  | 140.967.139.104,73      | 78.015.230.917,20  | 55,34        |
| 2021  | 168.864.062.465,31      | 93.456.851.905,00  | 55,34        |
| 2022  | 182.596.007.203,62      | 112.760.097.294,00 | 61,75        |

Tabel.2.4.3.1e  
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019- 2022

| NO | JENIS PAJAK                          | TAHUN | TARGET            | REALISASI         | %      |
|----|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
| 1  | PAJAK HOTEL                          | 2019  | 4.330.000.000,00  | 5.539.317.900,00  | 127,93 |
|    |                                      | 2020  | 2.200.000.000,00  | 2.354.370.972,00  | 107,02 |
|    |                                      | 2021  | 2.500.000.000,00  | 3.019.683.523,00  | 120,79 |
|    |                                      | 2022  | 4.400.000.000,00  | 5.459.934.356,00  | 124,09 |
|    |                                      |       |                   |                   |        |
| 2  | PAJAK RESTORAN                       | 2019  | 8.540.000.000,00  | 10.583.809.022,00 | 123,93 |
|    |                                      | 2020  | 9.000.000.000,00  | 10.095.677.043,00 | 112,17 |
|    |                                      | 2021  | 12.500.000.000,00 | 13.139.590.690,00 | 105,12 |
|    |                                      | 2022  | 23.000.000.000,00 | 24.506.327.310,00 | 106,55 |
|    |                                      |       |                   |                   |        |
| 3  | PAJAK HIBURAN                        | 2019  | 2.737.000.000,00  | 2.812.558.898,00  | 102,76 |
|    |                                      | 2020  | 1.450.000.000,00  | 1.557.155.585,00  | 107,39 |
|    |                                      | 2021  | 1.200.000.000,00  | 1.243.174.918,00  | 103,60 |
|    |                                      | 2022  | 2.500.000.000,00  | 2.799.593.774,00  | 111,98 |
|    |                                      |       |                   |                   |        |
| 4  | PAJAK REKLAME                        | 2019  | 4.000.000.000,00  | 4.183.587.030,00  | 104,59 |
|    |                                      | 2020  | 3.888.000.000,00  | 4.078.112.235,00  | 104,89 |
|    |                                      | 2021  | 3.500.000.000,00  | 3.877.285.734,00  | 110,78 |
|    |                                      | 2022  | 4.000.000.000,00  | 4.228.291.167,00  | 105,71 |
|    |                                      |       |                   |                   |        |
| 5  | PAJAK PENERANGAN JALAN               | 2019  | 34.500.000.000,00 | 35.380.619.748,00 | 102,55 |
|    |                                      | 2020  | 36.000.000.000,00 | 36.227.920.687,00 | 100,63 |
|    |                                      | 2021  | 38.000.000.000,00 | 38.771.500.977,00 | 102,03 |
|    |                                      | 2022  | 36.000.000.000,00 | 37.277.012.833,00 | 103,55 |
|    |                                      |       |                   |                   |        |
| 6  | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 2019  | 285.023.876,00    | 256.103.876,00    | 89,85  |
|    |                                      | 2020  | 0,00              | 10.000.000,00     |        |
|    |                                      | 2021  | 0,00              | 0,00              |        |
|    |                                      | 2022  | 0,00              | 0,00              |        |
|    |                                      |       |                   |                   |        |
| 7  | PAJAK PARKIR                         | 2019  | 255.000.000,00    | 312.284.600,00    | 122,46 |
|    |                                      | 2020  | 675.000.000,00    | 658.129.708,00    | 97,50  |
|    |                                      | 2021  | 600.000.000,00    | 602.120.640,00    | 100,35 |
|    |                                      | 2022  | 750.000.000,00    | 818.950.400,00    | 109,19 |
|    |                                      |       |                   |                   |        |

|    |                              |      |                   |                   |        |
|----|------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------|
| 8  | PAJAK SARANG BURUNG<br>WALET | 2019 | 60.000.000,00     | 80.070.000,00     | 133,45 |
|    |                              | 2020 | 60.000.000,00     | 74.915.000,00     | 124,86 |
|    |                              | 2021 | 60.000.000,00     | 67.690.000,00     | 112,82 |
|    |                              | 2022 | 75.000.000,00     | 76.265.000,00     | 101,69 |
| 9  | BPHTB                        | 2019 | 20.500.000.000,00 | 20.709.218.364,15 | 101,02 |
|    |                              | 2020 | 11.000.000.000,00 | 12.493.165.461,20 | 113,57 |
|    |                              | 2021 | 14.500.000.000,00 | 17.939.641.775,00 | 123,72 |
|    |                              | 2022 | 23.000.000.000,00 | 25.639.735.363,00 | 111,48 |
| 10 | PBB                          | 2019 | 12.000.000.000,00 | 10.429.412.705,00 | 86,91  |
|    |                              | 2020 | 9.500.000.000,00  | 10.148.253.846,00 | 106,82 |
|    |                              | 2021 | 14.000.000.000,00 | 14.480.656.198,00 | 103,43 |
|    |                              | 2022 | 16.000.000.000,00 | 16.211.049.794,00 | 101,32 |

Pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah kecenderungan meningkat terus selama 4 (empat) tahun terakhir baik secara nilai absolut maupun proporsi, hal ini berindikasi adanya peningkatan berbagai hal. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat mengakibatkan :

- Bertumbuhnya jumlah obyek atau subyek pajak secara kualitatif maupun kuantitatif
- Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang baik adalah taat pajak
- Petugas pajak yang lebih professional dalam melayani masyarakat sebagai obyek atau subyek pajak
- Peraturan dasar pemungutan pajak yang jelas berkeadilan.
- Ada kerjasamanya berbagai pihak terutama penegak hukum , tokoh masyarakat sehingga cukup menambah signifikan kenaikan.

**Tabel 2.4.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang**  
**2019-2020**

| No | TUJUAN                                                                            | SASARAN                                                           | INDIKATOR SASARAN/PROGRAM                                         | PROGRAM | CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN                                                                                     | SATUAN | REALISASI |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
|    |                                                                                   |                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                        |        | 2020      | 2019 |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                 | 4                                                                 | 5       | 6                                                                                                                      | 7      | 8         | 9    |
|    | Meningkatkan Kualitas Pendapatan , Keuangan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                        |        |           |      |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Pendapatan Daerah;                                   | Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah                 |         | jumlah kenaikan pendataan akurat potensi pajak daerah tahun (n) dibagi pertumbuhan Pajak dan Retribusi(n-1) dikali 100 | %      | 1,95      | 1,43 |
|    |                                                                                   | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien | Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah |         | Persentase Realisasi Belanja dibagi Anggaran Belanja dikali 100                                                        | %      | 86        | 87,7 |
|    |                                                                                   | Meningkatnya Tata kelola Aset Daerah                              | Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan aset secara tertib |         | jumlah OPD yg melaksanakan tertib administrasi aset x 100% :<br><br>Jumlah OPD seluruhnya                              | %      | 100       | 100  |

|  |  |  |  |                                                                                |                                                                                                                                    |   |     |     |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
|  |  |  |  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | Penyampaian Raperda APBD/P, Laporan Keuangan daerah, serta Peenyelesain SP2D tepat waktu dikali 100                                | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Program Manajemen Aset                                                         | Persensate OPD yang melaksanakan Manajemen ASET                                                                                    | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan dibagi dengan jumlah waktu target yang ditentukan dikalikan 100       | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tertangani dibagi jumlah layanan administrasi perkantoran yang dianggarkan dikali 100 | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi dibagi dengan jumlah sarana dan prasana yang ada di kali 100                    | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya dikali 100              | % | 100 | 100 |

Tabel 2.4.1b

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang  
Tahun 2021- 2022**

| No | TUJUAN                                                        | SASARAN                                                         | INDIKATOR<br>SASARAN/PRO<br>GRAM                          | PROGRAM | CARA PERHITUNGAN<br>INDIKATOR SASARAN                                        | SATUAN | REALISASI |       |                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                 |                                                           |         |                                                                              |        | 2022      | 2021  | TARGET<br>Akhir<br>Periode<br>Renstra<br>2023 |
| 1  | 2                                                             | 3                                                               | 4                                                         | 5       | 6                                                                            | 7      | 8         | 9     |                                               |
|    | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah |                                                                 | Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu |         | Laporan KP Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu dikali 100                        | %      | 100       | 100   | 100                                           |
|    |                                                               |                                                                 | Rasio PAD terhadap Realisasi Pendapatan                   |         | Jumlah PAD dibagi Pendapatan dikali 100                                      | %      | 19,49     | 17,81 | 19                                            |
|    |                                                               | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel | Persentase OPD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP        |         | Jumlah OPD Laporan Keuangan sesuai SAP dibagi seluruh jumlah OPD di kali 100 | %      | 100       | 100   |                                               |

|  |  |                                                         |                                            |                                                              |                                                                 |   |       |       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--|
|  |  | Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Menambah PAD | Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD |                                                              | Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dibagi PAD di kali 100 | % | 57,24 | 55,34 |  |
|  |  |                                                         |                                            | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          |                                                                 | % | 100   | 100   |  |
|  |  |                                                         |                                            | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                      |                                                                 | % | 100   | 100   |  |
|  |  |                                                         |                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                        |                                                                 | % | 100   | 100   |  |
|  |  |                                                         |                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |                                                                 | % | 100   | 100   |  |

**Tabel 2.4.2a**  
**Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019**

| NO  | Uraian                                                                         | Anggaran<br>APBD-P 2019 | Realisasi             |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|     | <b>BELANJA</b>                                                                 | <b>36.904.528.122</b>   | <b>31.028.600.749</b> | <b>84%</b> |
|     | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                  | <b>17.944.550.822</b>   | <b>17.177.788.559</b> | <b>96%</b> |
|     | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                        | <b>18.959.977.300</b>   | <b>13.850.812.190</b> | <b>73%</b> |
| I   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                                     | 2.286.493.000           | 1.896.666.654         | 83%        |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR                                          | 175.000.000             | 158.402.000           | 91%        |
| IV  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR                             | 175.000.000             | 130.703.200           | 75%        |
| V   | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 649.832.100             | 590.895.969           | 91%        |
| VI  | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH               | 11.883.575.100          | 7.926.429.237         | 67%        |

**Tabel 2.4.2b**  
**Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

| No | PROGRAM                                                                        | ANGGARAN (APBD-P)<br>2020 | REALISASI<br>BL.DESEMBER<br>2020 | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 2,341,348,217             | 2.137.809.222                    | 91.31% |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 2.023.216.800             | 1.229.294.536                    | 60.76% |
| 3  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 51,140,000                | 6,750,000                        | 13.20% |
| 4  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 378,427,300               | 348,935,600                      | 92.21% |
| 5  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah               | 11.856.861.821            | 10.438.683.933                   | 88.04% |
| 6  | Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah                                | 1,818,186,960             | 1,613,782,083                    | 88.76% |

**Tabel 2.4.2c**  
**Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021**

| No    | PROGRAM                                                | Anggaran (APBD-P ) 2021 | Realisasi Anggaran | %     |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| 1     | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                    | 6.034.500.603           | 3.646.341.158      | 60    |
| 2     | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                | 1.034.773.800           | 859.524.683        | 83,06 |
| 3     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                  | 3.662.700.041           | 3.302.507.055      | 90,17 |
| 4     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA | 34.611.363.936          | 27.809.196.702     | 80,35 |
| TOTAL |                                                        | 45.343.338.380          | 35.617.569.598     |       |

**Tabel 2.4.2d**  
**Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022**

| NO  | PROGRAM                                      | Anggaran APBD-P 2022 | REALISASI ANGGARAN | %       |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| I   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 37.285.058.616       | 33.590.534.333     | 90,09   |
| II  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH          | 21.956.365.080       | 3.574.176.085      | 16,28   |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH      | 1.890.287.400        | 1.424.435.826      | 75,36   |
| IV  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH        | 5.874.685.000        | 4.985.172.381      | 84,86   |
|     | TOTAL                                        | 67.006.396.096       | 43.574.318.625     | 66,6475 |

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

#### **3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, maka peranan Bakeuda sangat penting dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bakeuda, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1****Pemetaan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah**

| <b>Permasalahan Pokok</b>                                                      | <b>Permasalahan</b>                                                                                                       | <b>Akar Masalah</b>                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah | belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah                                                                     | Pemahaman Pengelola Keuangan dimasing-masing OPD terhadap akuntansi berbasis akrual belum memadai |
|                                                                                |                                                                                                                           | Terbatasnya kapabilitas SDM Pengurus Barang/Aset                                                  |
|                                                                                | Belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang | Penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak daerah bagi public belum maksimal          |
|                                                                                |                                                                                                                           | Kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah belum maksimal                         |

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , yang sudah diperoleh sejak tahun 2018, 2019,2020, 2021 oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang maka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bakeuda, namun perlu adanya sinergi dari seluruh Perangkat Daerah. Sampai saat ini terdapat permasalahan yaitu masih ada keterlambatan dari beberapa Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dan aset sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bakeuda sehingga mengurangi kesempurnaan tersebut, walaupun LKPD disampaikan tepat waktu pada akhirnya. Keterlambatan

tersebut dikarenakan pergantian petugas di tiap Perangkat Daerah dan tentunya ini bukan wewenang dari Bakeuda.

Dan belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dikarenakan masih adanya akar masalah berkenaan, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak publik, adanya beberapa keluhan yang disampaikan terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan beberapa pajak daerah lainnya, termasuk sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum optimal, sehingga masyarakat masih merasa belum merasa nyaman dan aman ketika melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak (WP).

### 3.2. Telaahan Tujuan Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Perumusan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Tujuan Daerah Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bakeuda adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 dan Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Sasaran Daerah Kota Pangkalpinang sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah adalah Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya,keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.2**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran**  
**RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026**  
**Dengan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang**

| Tujuan                                                                                                  | Indikator Tujuan           | Sasaran                                           | Indikator Sasaran/Daerah          | Formula Perhitungan                                        | Realisasi 2022 | Target |       |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|--|
|                                                                                                         |                            |                                                   |                                   |                                                            |                | 2024   | 2025  | 2026  |  |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                   |                                   | Angka RB dinilai dan dipublikasikan oleh Kementrian PAN RB | 60,15          | 62,5   | 63,5  | 64,5  |  |
|                                                                                                         |                            | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah | Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri                            | 81,21          | 81,25  | 81,30 | 81,35 |  |

### 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Provinsi

#### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa dalam lima tahun ke depan. Seluruh pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “ *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih

berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden. Uraian visi, misi beserta tujuan strategis dan sasaran strategis telah dirumuskan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia Periode 2019 - 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah dikaji dan dianalisis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang terdapat keterkaitan dengan :

- Visi ke-2 dengan kata kunci Profesional: Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- Misi ke-2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- Tujuan strategis ke-3: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Sasaran strategis ke-3 huruf a: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

**3.3.2 Telaah Renstra Badan Keuangan Provinsi Bangka Belitung, yaitu:**  
**Tujuan Dan Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026**  
**Yang Akan Didukung Oleh Badan Keuangan Daerah**

| Misi                                                                                                                 | Tujuan                                | Indikator Tujuan                                 | Sasaran                                                             | Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 3.<br>Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi Kinerja Kepala Daerah | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | 1. Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD<br>2.Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD<br>3.nilai rata-rata IPKD kabupaten kota<br>4.Opini BPK atas pemeriksaan LKPD<br><br>5.Ratio Kemandirian Keuangan |

Berdasarkan kajian antara Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Renstra Bakeuda Propinsi Bangka Belitung 2023-2026 yaitu pada Sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indicator Opini BPK atas pemeriksaaan LKPD.

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, luas wilayah Kota Pangkalpinang adalah  $\pm 104,49$  km<sup>2</sup> atau  $\pm 10.449$  hektare. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi, luas wilayah Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,64 persen dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fisiografi Kota Pangkalpinang berupa dataran dengan sedikit perbukitan, yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok fisiografi, yaitu : dataran berbukit bergelombang, dataran alluvial, dataran pasang surut, dataran banjir lembah sempit, delta atau dataran estuarin, jalur aliran sungai dan pesisir pantai. Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m dpl), yang terbagi ke dalam 5 kelas yaitu : 0–5 m dpl, 5–15 m dpl, 15–30 m dpl, 30–45 m dpl, dan 45–70 m dpl. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m dpl. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m dpl. Sedangkan ketinggian 30-70 m dpl terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Bukit Intan.

Berkaitan dengan terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang tersebut tentunya dibutuhkan dukungan dari semua lini terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan di semua sektor. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong juga kondisi tata ruang wilayah dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan , aset dan pendapatan daerah maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakeuda adalah sebagai berikut :

1. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang menuntut adaptasi yang cepat baik dalam tataran regulasi maupun turunan dari regulasi.
2. Pengaplikasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPD ) yang masih bergerak dinamis dan memerlukan adaptasi.
3. Laporan Keuangan berbasis akrual belum dapat menghasilkan laporan keuangan yang real time.
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal
5. Belum Optimalnya pemungutan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Tujuan** harus dapat menunjukan suatu kondisi yang diinginkan di masa mendatang, sedangkan tujuan RPD 2024 - 2026 Kota Pangkalpinang adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance ”** hal ini ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut : **“Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah”**

#### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Sasaran** yang ingin dicapai dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut **“ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ”** sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang untuk sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

| No  | Tujuan                                                               | Sasaran                                              | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran                                                 | Target Kinerja pada Tahun Ke |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
|     |                                                                      |                                                      |                                                                                      | 2024                         | 2025  | 2026  |
| (1) | (2)                                                                  | (3)                                                  | (4)                                                                                  | (5)                          | (6)   | (7)   |
| 1   | <b>Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah</b> |                                                      | Opini BPK terhadap LKPD                                                              | WTP                          | WTP   | WTP   |
|     |                                                                      | 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah | 100 %                        | 100 % | 100 % |
|     |                                                                      | 2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah  | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                            | 17 %                         | 18 %  | 19 %  |

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan daerah Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026**

| Tujuan/Sasaran (IKU)<br>Perangkat Daerah                      | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU)<br>Perangkat Daerah                           | Definisi Operasional                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah | Opini BPK terhadap LKPD                                                              | Hasil Penilaian LKPD Oleh BPK                                                                                                                                              |
| 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah          | Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah tahun berkenaan / Jumlah total laporan keuangan perangkat daerah tahun berkenaan x 100 % |
| 2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah           | Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                            | Realisasi PAD tahun berkenaan / Realisasi Pendapatan Daerah Tahun berkenaan x 100 %                                                                                        |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Strategi dan Kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan**

| Tujuan |                                                               | Sasaran                                              |   | Strategi                                                       |   | Kebijakan                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I      | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah | 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan bagi pengelola keuangan OPD  |
|        |                                                               |                                                      |   |                                                                | 2 | Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan bagi SDM pengurus barang |
|        |                                                               | 2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah  | 1 | Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah               | 1 | Meningkatkan Besaran Pajak Daerah                                                                               |
|        |                                                               |                                                      |   |                                                                | 2 | Meningkatkan Besaran Tagihan Pajak Daerah                                                                       |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penunjang Program dan kegiatan tersebut adalah:

| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |
| 2 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         |
| 5 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |
| 3 | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |
| 4 | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                     |
| 1 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                |
| 5 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  |
| 2         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      |
| <b>6</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |
| 1         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |
| 2         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       |
| 3         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  |
| 4         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |
| 5         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |
| 6         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |
| 7         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              |
| <b>7</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |
| 1         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |
| 2         | Pengadaan Mebel                                                                                                    |
| 3         | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                                                  |
| <b>8</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |
| 1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |
| 2         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |
| 3         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |
| 4         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |
| <b>9</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 2         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |
| 3         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |
| 4         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         |
| <b>1</b>  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                           |
| 1         | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         |
| 3         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                     |
| 4         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                           |
| 5         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                     |
| 6         | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                           |
| 8          | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                       |
| 9          | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                    |
| 10         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                                                                            |
| 11         | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                                        |
| <b>2</b>   | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                               |
| 1          | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                 |
| 2          | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                               |
| 3          | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                    |
| <b>3</b>   | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                             |
| 1          | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  |
| 2          | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        |
| 3          | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
| 4          | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       |
| <b>4</b>   | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                        |
| 1          | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                  |
| 2          | Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak                                                                                                                                                                                 |
| <b>5</b>   | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                                   |
| 1          | Inventarisasi dan analisis Data Bidang keuangan Daerah                                                                                                                                                                |
| 2          | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                               |
| 3          | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota                                                                                                                               |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b>   | <b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                       |
| 1          | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                     |
| 2          | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                        |
| 3          | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                         |
| 4          | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                               |
| 5          | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                      |
| 6          | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   |
| <b>VI</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>   | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                                           |
| 2  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |
| 3  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |
| 4  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |
| 5  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |
| 6  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| 7  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |
| 8  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |
| 9  | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |
| 10 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       |
| 11 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     |
| 12 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    |

# Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

| Tuj<br>uan                                                    | Sasaran                                           | Kode            | Program Kegiatan dan Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-<br>naan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |      |                |      |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Loka<br>si          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                                               |                                                   |                 |                                                            |                                                                                      |                                                 | 2024                                          |               | 2025 |                | 2026 |                |                                                             |                |                                              |                     |
|                                                               |                                                   |                 |                                                            |                                                                                      |                                                 | K                                             | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K                                                           | Rp             |                                              |                     |
| (1)                                                           | (2)                                               | (3)             | (4)                                                        | (5)                                                                                  | (6)                                             | (7)                                           | (8)           | (9)  | (10)           | (11) | (12)           | (13)                                                        | (14)           | (15)                                         | (16)                |
| Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah |                                                   |                 |                                                            |                                                                                      |                                                 |                                               |               |      |                |      |                |                                                             |                |                                              |                     |
|                                                               | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |                 |                                                            |                                                                                      |                                                 |                                               |               |      |                |      |                |                                                             |                |                                              |                     |
|                                                               |                                                   |                 |                                                            |                                                                                      |                                                 |                                               |               |      |                |      |                |                                                             |                |                                              |                     |
|                                                               |                                                   | 5.02.02         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                        | Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD (Dengan Satuan:%)                         | 100                                             | 100                                           | 8.738.463.858 | 100  | 11.294.621.255 | 100  | 13.050.778.653 | 100                                                         | 33.083.863.766 | Bidang Anggaran                              |                     |
|                                                               |                                                   |                 |                                                            | Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Dengan Satuan:%)         | 100                                             | 100                                           |               | 100  |                | 100  |                | 100                                                         |                | Bidang Anggaran                              |                     |
|                                                               |                                                   |                 |                                                            | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)            | 46                                              | 30                                            |               | 30   |                | 30   |                | 30                                                          |                | Bidang Anggaran                              |                     |
|                                                               |                                                   |                 |                                                            | Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)                   | 100                                             | 100                                           |               | 100  |                | 100  |                | 100                                                         |                | Bidang Perbendaharaa<br>n                    |                     |
|                                                               |                                                   |                 |                                                            | Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)                  | 100                                             | 100                                           |               | 100  |                | 100  |                | 100                                                         |                | Bidang Akuntansi dan Pelaporan               |                     |
|                                                               |                                                   | 5.02.02.2.01    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          | Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)        | 100                                             | 100                                           | 2.107.409.136 | 100  | 2.107.409.136  | 100  | 2.107.409.136  | 100                                                         | 6.322.227.408  | Kepala Bidang Anggaran                       |                     |
|                                                               |                                                   | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)                     | Dokumen                                         | 1                                             | 378.415.000   | 1    | 378.415.000    | 1    | 378.415.000    | 1                                                           | 1.135.245.000  | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran          | Kota Pangkal Pinang |
|                                                               |                                                   | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen) | Dokumen                                         | 1                                             | 307.565.000   | 1    | 307.565.000    | 1    | 307.565.000    | 1                                                           | 922.695.000    | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran          | Kota Pangkal Pinang |

|  |                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |         |     |             |     |             |     |             |     |               |                                           |                     |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------------------------------------------|---------------------|
|  | 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                                       | Dokumen | 33  | 116.270.000 | 33  | 116.270.000 | 33  | 116.270.000 | 33  | 348.810.000   | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                             | Dokumen | 33  | 104.600.000 | 33  | 104.600.000 | 33  | 104.600.000 | 33  | 313.800.000   | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                                      | Dokumen | 33  | 108.000.000 | 33  | 108.000.000 | 33  | 108.000.000 | 33  | 324.000.000   | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                             | Dokumen | 33  | 108.100.000 | 33  | 108.100.000 | 33  | 108.100.000 | 33  | 324.300.000   | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)                                                | Dokumen | 1   | 279.515.000 | 1   | 279.515.000 | 1   | 279.515.000 | 1   | 838.545.000   | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)                            | Dokumen | 1   | 269.840.000 | 1   | 269.840.000 | 1   | 269.840.000 | 1   | 809.520.000   | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                 | Dokumen | 3   | 435.104.136 | 3   | 435.104.136 | 3   | 435.104.136 | 3   | 1.305.312.408 | Sub Koordinator Penyusunan Anggaran       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.02    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)                                                                         | 100     | 100 | 538.742.222 | 100 | 538.742.222 | 100 | 538.742.222 | 100 | 1.616.226.666 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian           |                     |
|  | 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                              | Dokumen | 12  | 157.728.544 | 12  | 157.728.544 | 12  | 157.728.544 | 12  | 473.185.632   | Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah  | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                   | Dokumen | 8   | 146.765.522 | 8   | 146.765.522 | 8   | 146.765.522 | 8   | 440.296.566   | Sub Koordinator Pengendalian Belanja      | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait              | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen) | Dokumen | 12  | 234.248.156 | 12  | 234.248.156 | 12  | 234.248.156 | 12  | 702.744.468   | Sub Koordinator Penatausahaan Pengeluaran | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.03    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                              | Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)                                                                   | 100     | 100 | 693.807.750 | 100 | 693.807.750 | 100 | 693.807.750 | 100 | 2.081.423.250 | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan     |                     |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |               |     |               |     |               |     |                |                                                                 |                     |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)                                                                                                                    | Laporan | 3   | 149.546.592   | 3   | 149.546.592   | 3   | 149.546.592   | 3   | 448.639.776    | Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah                       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)                                                                                                            | Laporan | 1   | 37.649.700    | 1   | 37.649.700    | 1   | 37.649.700    | 1   | 112.949.100    | Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah                       | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen) | Dokumen | 2   | 436.031.708   | 2   | 436.031.708   | 2   | 436.031.708   | 2   | 1.308.095.124  | Sub Koordinator Akuntansi Penerimaan                            | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                                              | Dokumen | 1   | 70.579.750    | 1   | 70.579.750    | 1   | 70.579.750    | 1   | 211.739.250    | Sub Koordinator Akuntansi Pengeluaran                           | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.04    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              | <b>Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:%)</b>                                                                                                                                  | 100     | 100 | 5.000.000.000 | 100 | 7.556.157.397 | 100 | 9.312.314.795 | 100 | 21.868.472.192 | <b>Kepala Bidang Anggaran</b>                                   |                     |
|  | 5.02.02.2.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                                                                                                                                                | Laporan | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0              | Sub Koordinator Perumusan Kebijakan Anggaran                    | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)                                                                                                                                               | Laporan | 1   | 5.000.000.000 | 1   | 7.556.157.397 | 1   | 9.312.314.795 | 1   | 21.868.472.192 | Sub Koordinator Perumusan Kebijakan Anggaran                    | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.05    | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                                         | <b>Persentase Data dan SIPD Lingkup Keuangan Daerah yang Dapat Diakses (Dengan Satuan:%)</b>                                                                                                                                     | 100     | 100 | 398.504.750   | 100 | 398.504.750   | 100 | 398.504.750   | 100 | 1.195.514.250  | <b>Kepala Bidang Anggaran</b>                                   |                     |
|  | 5.02.02.2.05.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                             | Laporan | 1   | 348.504.750   | 1   | 348.504.750   | 1   | 348.504.750   | 1   | 1.045.514.250  | Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.02.2.05.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)                                                                                  | Orang   | 1   | 50.000.000    | 1   | 50.000.000    | 1   | 50.000.000    | 1   | 150.000.000    | Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah | Kota Pangkal Pinang |
|  |                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |               |     |               |     |               |     |                |                                                                 |                     |

|                                                  |                 |                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |     |                |     |                |     |                |     |                |                                                 |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|                                                  | 5.02.03         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                     | Persentase Ketersediaan Manajemen aset/BMD (Dengan Satuan:%)                                                                                         | 100     | 100 | 1.828.086.256  | 100 | 1.828.086.256  | 100 | 1.828.086.256  | 100 | 5.484.258.768  | Bidang Aset                                     |                     |
|                                                  | 5.02.03.2.01    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                             | Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)                                                                | 100     | 100 | 1.828.086.256  | 100 | 1.828.086.256  | 100 | 1.828.086.256  | 100 | 5.484.258.768  | Kepala Bidang Aset                              |                     |
|                                                  | 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                                                                 | Laporan | 34  | 400.000.000    | 34  | 400.000.000    | 34  | 400.000.000    | 34  | 1.200.000.000  | Sub Koordinator Penatausahaan Aset              | Kota Pangkal Pinang |
|                                                  | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                                                                          | Laporan | 200 | 527.122.260    | 200 | 527.122.260    | 200 | 527.122.260    | 200 | 1.581.366.780  | Sub Koordinator Pengamanan dan Pemanfaatan Aset | Kota Pangkal Pinang |
|                                                  | 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                               | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                        | Laporan | 1   | 136.050.000    | 1   | 136.050.000    | 1   | 136.050.000    | 1   | 408.150.000    | Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset  | Kota Pangkal Pinang |
|                                                  | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) | Dokumen | 20  | 268.574.288    | 20  | 268.574.288    | 20  | 268.574.288    | 20  | 805.722.864    | Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset  | Kota Pangkal Pinang |
|                                                  | 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                            | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                                        | Laporan | 34  | 307.789.708    | 34  | 307.789.708    | 34  | 307.789.708    | 34  | 923.369.124    | Sub Koordinator Penatausahaan Aset              | Kota Pangkal Pinang |
|                                                  | 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)                                | Orang   | 200 | 188.550.000    | 200 | 188.550.000    | 200 | 188.550.000    | 200 | 565.650.000    | Sub Koordinator Penatausahaan Aset              | Kota Pangkal Pinang |
| Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah |                 |                                                                                             |                                                                                                                                                      |         |     |                |     |                |     |                |     |                |                                                 |                     |
|                                                  | 5.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)                                                                                                   | 74,51   | 77  | 32.212.908.149 | 80  | 32.312.908.149 | 83  | 32.312.908.149 | 83  | 96.838.724.447 | Sekretariat                                     |                     |
|                                                  |                 |                                                                                             | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)                                                                            | NA      | 85  |                | 90  |                | 95  |                | 95  |                | Sekretariat                                     |                     |
|                                                  | 5.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)                                  | 100     | 100 | 22.305.000     | 100 | 22.305.000     | 100 | 22.305.000     | 100 | 66.915.000     | Sekretaris                                      |                     |

|  |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |             |     |                |     |                |     |                |     |                |                                                 |                                   |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                                                            | Dokumen     | 1   | 3.085.000      | 1   | 3.085.000      | 1   | 3.085.000      | 1   | 9.255.000      | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                       | Dokumen     | 1   | 8.410.000      | 1   | 8.410.000      | 1   | 8.410.000      | 1   | 25.230.000     | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                   | Dokumen     | 1   | 4.505.000      | 1   | 4.505.000      | 1   | 4.505.000      | 1   | 13.515.000     | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                       | Dokumen     | 1   | 600,000        | 1   | 600,000        | 1   | 600,000        | 1   | 1.800.000      | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                   | Dokumen     | 1   | 600,000        | 1   | 600,000        | 1   | 600,000        | 1   | 1.800.000      | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan) | Dokumen     | 1   | 2.020.000      | 1   | 2.020.000      | 1   | 2.020.000      | 1   | 6.060.000      | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                                                                                                                       | Dokumen     | 1   | 3.085.000      | 1   | 3.085.000      | 1   | 3.085.000      | 1   | 9.255.000      | Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)                                                                                                                 | 100         | 100 | 27.137.562.405 | 100 | 27.237.562.405 | 100 | 27.237.562.405 | 100 | 81.612.687.215 | Sekretaris                                      |                                   |
|  | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)                                                                                                                  | Orang/Bulan | 71  | 27.006.159.063 | 71  | 27.106.159.063 | 71  | 27.106.159.063 | 71  | 81.218.477.189 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                 | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                                     | Dokumen     | 12  | 72.393.392     | 12  | 72.393.392     | 12  | 72.393.392     | 12  | 217.180.176    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                 | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)                                                     | Laporan     | 1   | 4.505.000      | 1   | 4.505.000      | 1   | 4.505.000      | 1   | 13.515.000     | Sub Bagian Keuangan                             | K o t a P a n g k a l P i n a n g |

|  |                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                            |         |     |               |     |               |     |               |     |               |                                  |                                   |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|  | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan) | Laporan | 12  | 4.505.000     | 12  | 4.505.000     | 12  | 4.505.000     | 12  | 13.515.000    | Sub Bagian Keuangan              | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                 | Dokumen | 1   | 49.999.950    | 1   | 49.999.950    | 1   | 49.999.950    | 1   | 149.999.850   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Ditata dan Diinventarisir (Dengan Satuan:%)                                                                                  | 100     | 100 | 44.657.544    | 100 | 44.657.544    | 100 | 44.657.544    | 100 | 133.972.632   | Sekretaris                       |                                   |
|  | 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)                                                                                         | Laporan | 12  | 44.657.544    | 12  | 44.657.544    | 12  | 44.657.544    | 12  | 133.972.632   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:%)                                                                                                    | 0,5     | 0,5 | 154.118.860   | 0,3 | 154.118.860   | 0,2 | 154.118.860   | 0,2 | 462.356.580   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n |                                   |
|  | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)                                                                                               | Paket   | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0             | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                                   | Dokumen | 12  | 104.118.860   | 12  | 104.118.860   | 12  | 104.118.860   | 12  | 312.356.580   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)                                                                  | Orang   | 10  | 50.000.000    | 10  | 50.000.000    | 10  | 50.000.000    | 10  | 150.000.000   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)                                                                                                | 100     | 100 | 1.260.262.044 | 100 | 1.260.262.044 | 100 | 1.260.262.044 | 100 | 3.780.786.132 | Sekretaris                       |                                   |
|  | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                                                                   | Paket   | 1   | 21.949.000    | 1   | 21.949.000    | 1   | 21.949.000    | 1   | 65.847.000    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                                                                                       | Paket   | 1   | 101.656.000   | 1   | 101.656.000   | 1   | 101.656.000   | 1   | 304.968.000   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n | K o t a P a n g k a l P i n a n g |

|  |                 |                                                                    |                                                                                                           |         |     |               |     |               |     |               |     |               |                                 |                     |
|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------------------------|---------------------|
|  | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                                 | Paket   | 1   | 7.605.000     | 1   | 7.605.000     | 1   | 7.605.000     | 1   | 22.815.000    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                                  | Paket   | 3   | 291.467.500   | 3   | 291.467.500   | 3   | 291.467.500   | 3   | 874.402.500   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)                           | Paket   | 1   | 115.177.000   | 1   | 115.177.000   | 1   | 115.177.000   | 1   | 345.531.000   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)               | Laporan | 40  | 500.000.000   | 40  | 500.000.000   | 40  | 500.000.000   | 40  | 1.500.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)                              | Dokumen | 12  | 222.407.544   | 12  | 222.407.544   | 12  | 222.407.544   | 12  | 667.222.632   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)                                      | 100     | 100 | 1.274.159.000 | 100 | 1.274.159.000 | 100 | 1.274.159.000 | 100 | 3.822.477.000 | Sekretaris                      |                     |
|  | 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)  | Unit    | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0             | 1   | 0             | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)                                                   | Unit    | 1   | 365.710.000   | 1   | 365.710.000   | 1   | 365.710.000   | 1   | 1.097.130.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit) | Unit    | 1   | 908.449.000   | 1   | 908.449.000   | 1   | 908.449.000   | 1   | 2.725.347.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)                      | 100     | 100 | 1.409.113.138 | 100 | 1.409.113.138 | 100 | 1.409.113.138 | 100 | 4.227.339.414 | Sekretaris                      |                     |
|  | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)                                     | Laporan | 12  | 34.307.544    | 12  | 34.307.544    | 12  | 34.307.544    | 12  | 102.922.632   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kota Pangkal Pinang |

|  |                 |                                                                                                                     |                                                                                                                             |         |     |               |     |               |     |               |     |                |                                                |                     |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------|------------------------------------------------|---------------------|
|  | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)              | Laporan | 12  | 673.608.000   | 12  | 673.608.000   | 12  | 673.608.000   | 12  | 2.020.824.000  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)                    | Laporan | 4   | 87.052.000    | 4   | 87.052.000    | 4   | 87.052.000    | 4   | 261.156.000    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)                                | Laporan | 2   | 614.145.594   | 2   | 614.145.594   | 2   | 614.145.594   | 2   | 1.842.436.782  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)                                               | 100     | 100 | 910.730.158   | 100 | 910.730.158   | 100 | 910.730.158   | 100 | 2.732.190.474  | Sekretaris                                     |                     |
|  | 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit) | Unit    | 1   | 55.347.772    | 1   | 55.347.772    | 1   | 55.347.772    | 1   | 166.043.316    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit) | Unit    | 58  | 298.790.000   | 58  | 298.790.000   | 58  | 298.790.000   | 58  | 896.370.000    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)                               | Unit    | 1   | 413.540.386   | 1   | 413.540.386   | 1   | 413.540.386   | 1   | 1.240.621.158  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  | 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)         | Unit    | 8   | 143.052.000   | 8   | 143.052.000   | 8   | 143.052.000   | 8   | 429.156.000    | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                | Kota Pangkal Pinang |
|  |                 |                                                                                                                     |                                                                                                                             |         |     |               |     |               |     |               |     |                |                                                |                     |
|  | 5.02.04         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                               | Pertumbuhan Pajak Daerah (Dengan Satuan:%)                                                                                  | 5       | 5   | 5.342.354.432 | 5   | 5.342.354.432 | 7   | 5.342.354.432 | 7   | 16.027.063.296 | Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah  |                     |
|  |                 |                                                                                                                     | Persentase Capaian Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:%)                                                                 | 5       | 5   |               | 5   |               | 7   |               | 7   |                | Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah |                     |
|  | 5.02.04.2.01    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                              | Persentase Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:&)                                              | 100     | 100 | 5.342.354.432 | 100 | 5.342.354.432 | 100 | 5.342.354.432 | 100 | 16.027.063.296 | Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan        |                     |

|  |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                |             |       |             |       |             |       |             |       |               |                                                        |                                   |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                |             |       |             |       |             |       |             |       |               | Pajak Daerah                                           |                                   |
|  |                 |                                                                                                                           | Persentase Nilai Pajak Daerah yang Tertagih (Dengan Satuan:%)                                                                  | 100         | 100   |             | 100   |             | 100   |             | 100   |               | Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah  |                                   |
|  | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)    | Dokumen     | 1     | 704.561.160 | 1     | 704.561.160 | 1     | 704.561.160 | 1     | 2.113.683.480 | Sub Koordinator Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah  | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                        | Laporan     | 1     | 412.771.316 | 1     | 412.771.316 | 1     | 412.771.316 | 1     | 1.238.313.948 | Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)                                                      | Unit        | 1     | 121.649.000 | 1     | 121.649.000 | 1     | 121.649.000 | 1     | 364.947.000   | Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan) | Laporan     | 1     | 333.329.200 | 1     | 333.329.200 | 1     | 333.329.200 | 1     | 999.987.600   | Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah   | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)                   | Laporan     | 1     | 575.427.172 | 1     | 575.427.172 | 1     | 575.427.172 | 1     | 1.726.281.516 | Sub Koordinator Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah  | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Dengan Satuan:Obyek Pajak)                                                       | Objek Pajak | 69000 | 321.192.544 | 69000 | 321.192.544 | 69000 | 321.192.544 | 69000 | 963.577.632   | Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah   | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                                                                  | Dokumen     | 74500 | 70.750.922  | 74500 | 70.750.922  | 74500 | 70.750.922  | 74500 | 212.252.766   | Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah   | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|  | 5.02.04.2.01.09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Layanan)                                                             | Layanan     | 10    | 10.500.000  | 10    | 10.500.000  | 10    | 10.500.000  | 10    | 31.500.000    | Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan              | K o t a P a n g k a l P i n a n g |

|        |                 |                                                                        |                                                                                                         |         |                |               |                |               |                |               |                 |               |                                                         |                                   |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                 |                                                                        |                                                                                                         |         |                |               |                |               |                |               |                 |               | Pajak Daerah                                            | ng                                |
|        | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                         | Dokumen | 52963          | 1.161.427.254 | 52963          | 1.161.427.254 | 52963          | 1.161.427.254 | 52963           | 3.484.281.762 | Sub Koordinator Penagihan dan Piutang Pajak Daerah      | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|        | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)                        | Dokumen | 40             | 50.197.000    | 40             | 50.197.000    | 40             | 50.197.000    | 40              | 150.591.000   | Sub Koordinator Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah  | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|        | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) | Dokumen | 10             | 1.501.992.864 | 10             | 1.501.992.864 | 10             | 1.501.992.864 | 10              | 4.505.978.592 | Sub Koordinator Operasional dan Penindakan Pajak Daerah | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
|        | 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)      | Laporan | 3              | 78.556.000    | 3              | 78.556.000    | 3              | 78.556.000    | 3               | 235.668.000   | Sub Koordinator Operasional dan Penindakan Pajak Daerah | K o t a P a n g k a l P i n a n g |
| TOTAL: |                 |                                                                        |                                                                                                         |         | 48.121.812.695 |               | 50.777.970.092 |               | 52.534.127.490 |               | 151.433.910.277 |               |                                                         |                                   |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator Kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

**TABEL .7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024 -2026**

| NO | INDIKATOR/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM                                                    | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------------------|
|    |                                                                                      | Tahun 2022                              | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 |                                          |
|    |                                                                                      |                                         | 2024                        | 2025    | 2026    |                                          |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                       | 4                           | 5       | 6       | 7                                        |
| 1  | Opini BPK terhadap LKPD                                                              | WTP                                     | WTP                         | WTP     | WTP     | WTP                                      |
| 2  | Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah | 100%                                    | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%                                     |
| 3  | Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD                                           | 100%                                    | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%                                     |
|    | Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah                           | 100%                                    | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%                                     |
|    | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                              | 46%                                     | 30%                         | 30%     | 30%     | 30%                                      |
|    | Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel                                     | 100%                                    | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%                                     |
|    | Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel                                    | 100%                                    | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%                                     |
| 4  | Persentase Ketersediaan Manajemen aset/ BMD                                          | 100%                                    | 100%                        | 100%    | 100%    | 100%                                     |
| 5  | Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                            | 16%                                     | 17%                         | 18%     | 19%     | 19%                                      |
| 6  | Pertumbuhan Pajak Daerah                                                             | 5%                                      | 5%                          | 5%      | 7%      | 7%                                       |
|    | Presentase Capaian Penagihan Pajak Daerah                                            | 5%                                      | 5%                          | 5%      | 7%      | 7%                                       |
| 7  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                         | 74,51                                   | 77                          | 80      | 83      | 83                                       |
|    | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah                                  |                                         | 80%                         | 85%     | 90%     | 90%                                      |

## **Bab. VIII. PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJP D Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2026.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target RENSTRA dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum RENSTRA dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. RENSTRA akan dijabarkan dalam RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada RENSTRA.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan RENSTRA Badan Keuangan Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang,     Maret 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**



**BUDIYANTO, S.Kom, M.Si**  
**NIP. 197212012005011008**